

**AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR TELAAH PERDA NOMOR
6 TAHUN 2013 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANJAS APRIZAL

10200116101

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anjas Aprizal
Nim : 10200116101
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 26 April 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jln. Tamangapa Raya
Judul : Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk
Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun
2013 Perspektif Siyasah Syar'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 11 Desember 2020

Penyusun



Anjas Aprizal
10200116101

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **“Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif Siyash Syar’iyyah”** Yang disusun oleh Anjas Aprizal, Nim. 10200116101, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 1 Februari 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 1 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H, M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H, Sabri Samin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I	(.....)
Penguji I	: Dr. Hamzah, M.H.I	(.....)
Penguji II	: Dr. Kurniati, M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag
NIP. 19731122200012 1

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah swt, karena atas segala nikmat baik berupa rahmat maupun karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salam dan selawat semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, para sahabat serta kerabat-nya, dan juga umatnya yang senantiasa bersama Rasulullah membawa risalah Allah swt sebagai junjungan yang menjadi suri tauladan terhadap seluruh umat manusia dan membawa dunia dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang dipenuhi cahaya karena syafaat yang diberikan kepada seluruh umat manusia.

Terima kasih atas kebesaran jiwa, cinta dan kasih sayang yang begitu besar serta doa yang selalu tercurahkan dari kedua orangtua, dan saudara dan saudariku yang tercinta. Ayahku Abdul Aziz Jaya, Ibuku Mardiana, dan kedua Adikku Afidin Anwar dan Atika Fairuq Selviana yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, juga nasihat, serta bimbingan secara penuh hingga sampai pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) sekaligus penyelesaian akhir studi program sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Disadari betul bahwa penulis sebagai bagian dari seluruh makhluk Allah swt yang lemah, sudah pasti secara sosial sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, terasa sangat bijkasana bila menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada sederetan hamba Allah swt yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, maupun bantuan yang diberikan kiranya dicatat

oleh Allah swt sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ayahanda Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Ayahanda Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Ibunda Dr. Kurniati, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN Alauddin Makassar;
4. Ayahanda Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ayahanda Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I. selaku Pembimbing II. Mereka ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ayahanda Dr. Hamzah M.H.I selaku Penguji I dan Ibunda Dr. Kurniati, M.H.I selaku Penguji II;
6. Seluruh dosen jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan seluruh ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, juga kepada seluruh staf Jurusan Hukum Tatanegara serta staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang sudah banyak membantu selama proses pengurusan berkas dan ujian sarjana;
7. Tetta Tiro (Alm) dan Nenek Ti'no sebagai orangtua pengganti yang telah membesarkan dan memberikan semangat hidup sampai saat ini;
8. Om Ji'ji dan Tante Kebo untuk semua dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan perkuliahan selama ini;

9. Keluarga besar Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) terkhusus Angkatan 2016, dan special buat teman-teman HTN C 2016 yang telah menemani berjuang bersama selama kurang lebih 4 tahun hingga selesainya skripsi ini;
10. Seluruh relawan LINTAS PELOSOK ILMU yang telah menjadi keluarga dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi saya;
11. Teman-teman RTC Pondok Mawang, Anil, Taufik, Aldi, Rosman, Ahmad, Ifal, dan Yosi atas semua dukungan dan motivasi mereka dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Saudara seperjuangan saya selama ini, Andi Igox S.H yang setia menemani, memotivasi, dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Monalisa yang saya anggap seperti saudari sendiri yang tidak lelah untuk menemani, memotivasi, dan mendengarkan semua keluhan-keluhan saya di dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Puang Albar S.H, Muammar Salam Andi Rakib S.H, Ummu Kalsum S.H, dan Mappu S.H yang telah menjadi sahabat saya untuk menemani dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat seperjuangan selama ini atas dukungan dan motivasinya: Amar, Hasyim, Ma'nur, Nyup, Ardi, Arman, Nando, Salim, Aswad, Didit, Hasbar, Appang, Akbar, Rabbani, dan Herman;
16. Semua sahabat atas kesetiiaannya menemani, meluangkan waktu, memberikan motivasi, serta pengalaman berharga dalam hidup untuk senantiasa sabar dan bersikap dewasa;

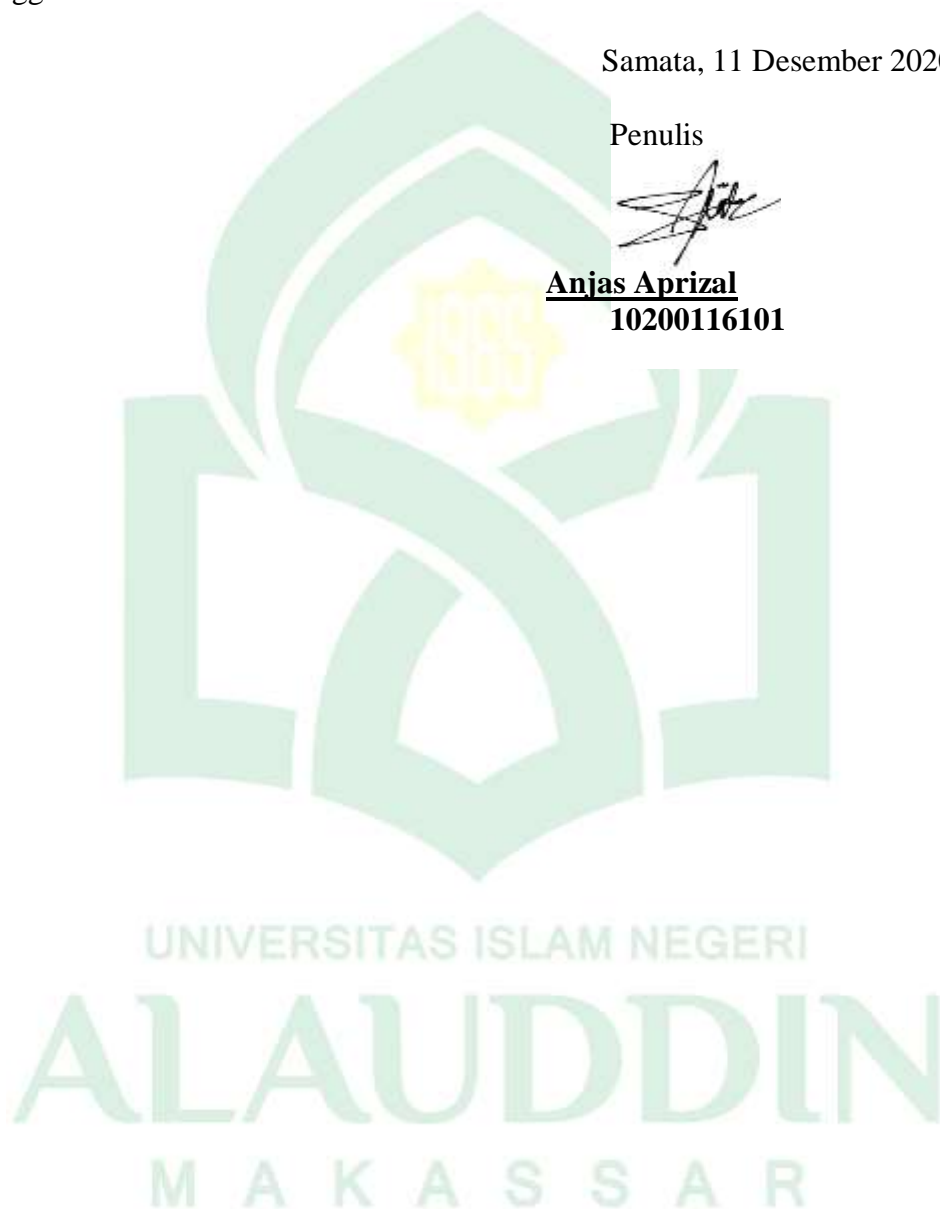
Atas segala bantuan, partisipasi, kerja sama yang diberikan dengan ikhlas hati hingga terselesaikannya skripsi ini. Akhirnya dengan segala rendah hati jika terdapat kekeliruan untuk itu mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Samata, 11 Desember 2020

Penulis



Anjas Aprizal
10200116101



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Tinjauan Umum Aksesibilitas Transportasi Umum	11
1. Pengertian Aksesibilitas Transportasi Umum	11
2. Jenis-Jenis Aksesibilitas Transportasi Umum	16
B. Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas	25
1. Pengertian Disabilitas	25
2. Disabilitas Dalam Perspektif Islam	27
3. Jenis-Jenis Disabilitas	31
C. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40

G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Bentuk Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.....	42
B. Pelaksanaan Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.....	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab. yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> an <i>yā</i> ''	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> ''	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> <i>yā</i> ''	I	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ا ber-

tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ِ ى alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-*Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partake huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā’* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Anjas Aprizal

Nim : 10200116101

Judul : Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif Siyasah Syar'iyah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aksesibilitas transportasi umum untuk penyandang disabilitas di Kota Makassar telaah perda nomor 6 tahun 2013 perspektif *siyasah syar'iyah*? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi menjadi beberapa submasalah yang membahas tentang 1. Bagaimana bentuk aksesibilitas transportasi umum di Kota Makassar? 2. Bagaimana pelaksanaan aksesibilitas transportasi umum di Kota Makassar?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *feed kualitatif research*. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Bentuk aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar dalam bidang halte dan bus *Transmamminasata* yang dibangun oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan masih jauh dari kata layak, dan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di halted dan bus *Transmamminasata* membuat para penyandang disabilitas masih sulit dalam menggunakan aksesibilitas transportasi umum tersebut. 2. Pelaksanaan aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang di Kota Makassar melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah masih belum berjalan dengan baik yang membuat para penyandang disabilitas seakan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan fasilitas yang jauh dari kata aman dan nyaman untuk digunakan, pemerintah belum merealisasikan dengan baik perda yang berlaku sehingga masih banyaknya permasalahan yang terjadi didalam pembangunan aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas.

Implikasi dari penelitian ini, yaitu 1. Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meninjau kembali bentuk aksesibilitas transportasi umum yang dibangun, karena masih jauh dari kata aksesibel sesuai aturan perda yang berlaku. 2. Dalam pelaksanaan aksesibilitas transportasi umum pemerintah wajib untuk mengikutsertakan para penyandang disabilitas dalam pembangunannya agar aman dan nyaman dalam menggunakan aksesibilitas transportasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya masyarakat diawali dari adanya perkumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi mana dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Sepanjang interaksi tersebut, masyarakat berpegang pada hukum sebagai pedoman-pedoman yang berfungsi sebagai tata tertib, aturan, petunjuk dan kaidah-kaidah sehingga anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dapat berjalan dengan baik dan tertib. Aturan-aturan hukum tersebut menjadi gejala pada setiap masyarakat di manapun mereka berada.¹

Disabilitas merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keterbatasan aktivitas karena adanya kondisi keterbatasan fisik, intelektual, dan mental dalam jangka waktu yang lama atau bahkan seumur hidupnya. Kondisi seperti ini biasanya orang-orang pada umumnya memandang sebelah mata disabilitas dan menjauhi mereka sebagai manusia yang berbeda.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara

¹Nila Sastrawaty, "Hukum Sebagai Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan", *Jurnal al-Daulah*, vol. 1 no. 1 (Desember 2012), h. 86.

non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.²

Para penyandang disabilitas pada umumnya memiliki permasalahan yang lebih dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka biasanya sangat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas umum seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan kesamaan kedudukan di mata hukum. Permasalahan ini merupakan kendala utama untuk mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Hak asasi bagi mereka penyandang disabilitas masih kerap disepelekan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi akibat mereka masih sering dipandang sebagai manusia yang berbeda atau bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Hal ini cukup jelas menggambarkan bahwa penyandang disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang mendapatkan diskriminasi dari orang lain.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal ini sangat jelas menggambarkan bahwa setiap penyandang cacat berhak mendapatkan hak sama seperti warga lainnya, tidak ada

²Akhmad Soleh, *Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2016), h. 24.

diskriminasi atau perbedaan terhadap mereka. Karena pada dasarnya HAM itu tidak melihat perbedaan antara suku, agama, ras, bahkan kelainan fisik sekalipun.³

Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat terlihat jelas dalam QS al-Nisā /4: 86.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”.⁴

Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya.

Aksesibilitas mencakup sarana dan prasarana transportasi yang mengembangkan daya tarik suatu daerah, aksesibilitas juga mencakup peraturan

³Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 13.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 91.

atau regulasi pemerintahan yang mengatur rute dan tarif angkutan.⁵ Ketersediaan aksesibilitas saat ini masih belum bisa dikatakan layak bagi penyandang disabilitas. Kenyataannya bahwa hambatan pada fasilitas umum yang disediakan tidak semua mudah atau bahkan tidak memungkinkan untuk digunakan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian penyandang disabilitas tidak memperoleh kesamaan hak untuk menikmati fasilitas umum.

Dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menjelaskan bahwa Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hal ini kemudian sangat penting buat para penyandang disabilitas agar aktivitas sehari-hari mereka dapat dimudahkan dengan adanya fasilitas atau aksesibilitas yang mendukung mereka. Fasilitas atau aksesibilitas ini harus disediakan oleh pemerintah agar dapat digunakan oleh semua masyarakat.

Tetapi kenyataannya pemerintah belum menyediakan dan merealisasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Peran pemerintah dan dinas perhubungan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, kenyamanan dan keselamatan mereka diposisikan sama seperti masyarakat pada umumnya, meskipun mereka memiliki keterbatasan.

Pembangunan transportasi umum juga merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dan pembangunannya harus memenuhi standar agar semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya dengan baik, agar semua kalangan masyarakat dapat menggunakan aksesibilitas

⁵Muaini, *Buku Ajar Kebudayaan dan Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2018), h. 13.

publik tersebut secara maksimal dan optimal, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas.⁶

Transportasi adalah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin untuk memindahkan barang dan manusia dari suatu tempat ketempat yang lainnya. Transportasi juga merupakan unsur terpenting dalam kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kepadatan penduduk juga menjadi pengaruh lancarnya pelayanan kebutuhan transportasi. Manusia dan transportasi memiliki keterkaitan yang erat, dimana manusia membutuhkan transportasi pengaruh lancarnya pelayanan kebutuhan transportasi. sebagai sarana untuk memindahkan barang yang mereka butuhkan dan sebagai sarana untuk berpergian.

Peraturan daerah Kabupaten Kota sebagai subsistem perundang-undangan berkaitan dengan kemandirian dalam berotonomi, namun tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kesatuan perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada aturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁷

Pemerintah Kota Makassar juga sangat memperhatikan penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2013 tentang

⁶Putu Nia Rusmiari Dewi, “Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kesejahteraan Sosial*, vol. 1 no. 1 (Januari 2017), h. 2.

⁷Jumadi, “Memahami Konsep Konsep Konstitusionalisme Indonesia”, *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 3 no. 2 (Desember 2016), h. 117.

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan ini merupakan payung hukum bagi penyandang disabilitas di Makassar. Negara dengan melalui peraturan daerah ini telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah Kota Makassar untuk menjamin terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas agar sama dengan masyarakat lainnya dalam perlindungan dimata hukum. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya agar mencapai tujuan bersama dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, karena bagaimana pun mereka juga sama dengan masyarakat lainnya.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

- a. Aksesibilitas Transportasi Umum
- b. Penyandang Disabilitas
- c. Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

2. Deskripsi Fokus

Adapun deksripsi fokus dalam penelitian ini sebagai penjelasan terperinci dari fokus masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas Transportasi Umum
 1. Aksesibilitas adalah pemenuhan terhadap kemudahan yang disediakan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan standar yang telah pemerintah tetapkan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek pelayan publik.
 2. Transportasi umum adalah alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat asal ketempat tujuan menggunakan angkutan yang digerakkan oleh mesin, hewan, dan manusia.

Jadi aksesibilitas transportasi umum yaitu pemenuhan terhadap kemudahan yang disediakan terhadap penyandang disabilitas berupa alat yang digunakan untuk memindahkannya dari suatu tempat ketempat lainnya dengan efektif dan efisien menggunakan suatu angkutan yang digerakkan oleh mesin, hewan, atau manusia itu sendiri.

b. Penyandang Disabilitas

1. Penyandang adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau menerima sesuatu.
2. Disabilitas adalah keterbatasan fisik dan mental yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang.

Jadi penyandang disabilitas adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau menyandang keterbatasan fisik dan mental sejak lahir, di mana akan menghambat interaksi mereka dengan lingkungannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

c. Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

1. Perspektif adalah suatu pandangan atau pendapat yang dikeluarkan seseorang atau sekelompok orang dalam mengkaji sesuatu.
2. *Siyasah syar'iyah* diartikan sebagai sistem perpolitikan yang dijalankan oleh suatu negara dalam menentukan suatu kebijakan berdasarkan syariat Islam.

Jadi perspektif *siyasah syar'iyah* adalah suatu pandangan sistem politik yang mengelola suatu pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan berdasarkan ketentuan syariat dalam suatu negara untuk kemaslahatan umat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana aksesibilitas transportasi umum penyandang disabilitas di Kota Makassar telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 perspektif *siyasah syar'iyah*. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka penulis membatasi sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar?
2. Bagaimana pelaksanaan aksesibilitas transportasi umum untuk penyandang disabilitas di Kota Makassar?

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Nila Sastrawaty dalam jurnalnya yang berjudul Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Perkosaan yang membahas tentang berbagai pandangan masyarakat terhadap korban pemerkosaan dan berbagai pandangan yang terdiri dari beberapa dugaan atau asumsi yang seringkali pemerkosaan yang terjadi kepada perempuan merupakan sebuah kutukan. Tetapi di dalam jurnal ini tidak membahas tentang pembahasan yang lebih mendalam tentang bagaimana keadilan bagi seorang perempuan dalam perspektif hukum Islam.

Akhmad Soleh Dalam bukunya yang berjudul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi. Buku ini membahas tentang permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas diperguruan tinggi, persamaan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, kebijakan dan peraturan

perguruan tinggi terhadap penyandang disabilitas. Namun di dalam buku ini tidak dijelaskan penyelenggara negara sebagai *policy maker* yang dituntut untuk memahami kebutuhan para penyandang disabilitas, memahami acuan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas serta konsep peruntukan untuk apa fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas tersebut dibangun.

Fadli Andi Natsif Dalam bukunya *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* yang inti pembahasannya membahas tentang HAM dalam perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, serta membahas kejahatan HAM yang terjadi di Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. Namun di dalam buku ini tidak dijelaskan faktor penyebab pelanggaran HAM dan kesadaran HAM melalui kegiatan sosialisasi karena sosialisasi tentang penegakan HAM akan mampu meningkatkan pemahaman HAM masyarakat yang akan berujung pada kesadaran HAM yang tinggi.

Muaini dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar Kebudayaan dan Pariwisata* yang membahas tentang perkembangan sektor pariwisata, dampak destinasi pariwisata dalam menentukan perkembangan ekonomi suatu negara, serta aksesibilitas sebagai daya tarik wisata. Namun di dalam buku ini tidak dijelaskan peran pemerintah dalam memberikan sumbangan berupa dana yang digunakan dalam membenahi fasilitas pendukung yang berfungsi untuk mendukung jalannya proses pengembangan daya tarik wisata.

Putu Nia Rusmiari Dewi, dalam penelitian yang berjudul *Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Halte Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta*

membahas tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, aksesibilitas halte bus trans Jogja bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, dan implementasi peraturan perundang-undangan no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun di dalam penelitian ini tidak dijelaskan peningkatan anggaran yang dikhususkan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa disabilitas membutuhkan pendampingan dan pelayanan yang setara dengan non-disabilitas.

Jumadi, dalam jurnalnya yang berjudul Memahami Konsep Konsep Konstitusionalisme Indonesia membahas tentang konstitusi yang semakin penting dalam negara-negara modern saat ini, bahkan umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. Namun di dalam jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk hukum dan keadilan pada masyarakat melalui kepastian hukum dalam bingkai positivisme yang mengukuhkan undang undang.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian dapat memberikan mamfaat dalam bidang ilmu pengetahuan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah:

a. Kegunaan Teoretis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi kalangan masyarakat
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah Kota Makassar agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas di Kota Makassar.

b. Kegunaan Praktis

Dalam hal ini diharapkan menjadi sebuah bacaan agar semua orang lebih tertarik dengan kebijaksanaan terkait penyandang disabilitas, agar tidak ada lagi perilaku diskriminasi untuk mereka.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Aksesibilitas Transportasi Umum

1. Pengertian Aksesibilitas Transportasi Umum

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan. Dapat juga dikatakan bahwa berbagai bidang tersebut harus dapat digunakan oleh penyandang disabilitas agar mereka mampu untuk mendapatkan kesempatan, kesetaraan, dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Secara garis besar perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu dalam lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dan dalam bentuk konstitusi sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi. Negara-negara yang menganut perwujudan kedaulatan rakyat dalam parlemen mengakibatkan dianutnya prinsip supremasi parlemen. Konstitusi dalam suatu negara dapat dibuat dan diubah dengan produk hukum parlemen pemerintahan. Sedangkan negara yang menganut perwujudan kedaulatan rakyat pada konstitusi menempatkan sebuah aturan konstitusi sebagai hukum tertinggi.²

Membangun aksesibilitas untuk melancarkan aktivitas kegiatan sehari-hari masyarakat itu penting bagi pemerintah. Kota-kota besar di Indonesia cenderung

¹Rina Herlina Haryanti, Candra Sari, “Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta”, *Jurnal Spirit Publik*, vol. 12 no. 1 (April 2017), h. 86.

²Jumadi, “Memahami Konsep Konsep Konstitusionalisme Indonesia”, *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 3 no. 2 (Desember 2016), h. 111.

memilih pembangunan transportasi yang berbasis jalan raya karena pembangunannya dipandang lebih murah dari segi aspek ekonomi dan sosial sehingga lebih mudah diwujudkan. Sementara biaya politik yang jauh lebih mahal dapat diselesaikan dengan pendekatan dan negoisasi dari pemangku kepentingan.³

Aksesibilitas pada dasarnya merupakan kemudahan yang dicapai oleh masyarakat terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan dalam aktivitasnya. Kemudahan akses tersebut diwujudkan pada bangunan gedung, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya. Yang dimaksudkan adalah jika seseorang ingin melakukan perjalanan sebaiknya tersedia sarana angkutan yang diperlukan dan tidak ada kesulitan untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang akan digunakan.⁴

Aksesibilitas menurut Keputusan Menteri Pekerja Umum Nomor 468/KPTS Tahun 1998 ialah “Kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Hal ini menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan persamaan akses kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Aksesibilitas tersebut diterapkan pada fasilitas umum. Contohnya seperti, ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, toilet, pancuran, wastafel, telepon umum, perlengkapan perabot, dan rambu lalu lintas.

³S Aminah, *Penataan Transportasi Publik-Privat dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), h. 53.

⁴Raharjo Adisasmita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 124.

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai asas atau kriteria aksesibilitas yang baik sebagai acuan dasar penyediaan akses pada sarana dan prasarana, yaitu meliputi:

- a. Kemudahan adalah semua masyarakat dapat menjangkau semua tempat atau bangunan yang bersifat umum pada suatu tempat.
- b. Kegunaan adalah semua masyarakat dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Keselamatan adalah setiap bangunan fasilitas umum dalam suatu tempat yang terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua masyarakat.
- d. Kemandirian adalah semua masyarakat bisa mencapai dan menggunakan semua tempat fasilitas umum dalam suatu tempat tanpa membutuhkan bantuan orang lain.⁵

Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam mewujudkan ruang fasilitas umum dan gedung publik yang aksesibel bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pemilik atau pengelola gedung serta pemerintah daerah mengenai acuan aksesibilitas dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Keadaan ini terjadi akibat mereka belum paham untuk memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas dan lansia sehingga kebutuhannya terabaikan.⁶

⁵Ezza Oktivia Utami dkk “Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa”, *Jurnal Penelitian & PPM*, vol. 5 no. 1 (April 2018), h. 90.

⁶Irma Rahayu, “Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar”, *Nature*, vol. 5 no. 2 (Januari 2018), h. 51.

Bagaimanapun, keadilan haru diwujudkan agar mampu memaknai arti dari supermasi hukum, menghilangkan ketidakberpihakan dalam hukum dan tetap pada wujud keadilan, Karena hukum menjadi mati ketika kehilangan kematian. Dalam keadaan seperti itu, hukum tidak lagi berarti bagi pencari keadilan, bahkan berubah wujud yang memporak-porakdakan cita rasa keadilan yang sejatinya dinikmati untuk semua masyarakat.⁷

Islam sangat memperhatikan aksesibilitas transportasi umum agar membawa kebahagiaan hidup manusia. Kebahagiaan tersebut bisa didapatkan manakala manusia dapat membedakan antara kebutuhan mereka dan tujuan hakiki yang hendak mereka tuju melalui proses pemenuhan atas kebutuhan yang beragam tersebut. Lebih dari itu, agama yang dibawa Muhammad ini juga sarat dengan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam semesta secara keseluruhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an berkaitan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.⁸

Transportasi merupakan kegiatan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berlangsung dalam satu ruang. Unsur utama sistem transportasi dalam prosesnya yaitu terdiri atas objek orang atau barang, sarana transportasi, prasarana, dan regulasi. Transportasi sebagai sistem mencakup subsistem prasarana berupa jalur dan tempat pergerakan, dan subsistem

⁷Marilang, "Menimbang paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, vol. 14 no. 2 (Juni 2017), h. 317.

⁸Miftahur Ridho, "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas", *Jurnal Al-Bayan*, vol. 23 no. 1 (Juli 2017), h. 106.

pengendalian pengaturan yang memungkinkan pergerakan tersebut lebih efisien dan efektif.⁹

Transportasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari tempat asal ke tempat tujuan, di mana di tempat tujuan objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan- tujuan tertentu.¹⁰

Pada dasarnya, ada lima unsur transportasi yang saling berkaitan untuk terlaksananya transportasi, yaitu terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut untuk sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada awal diangkut. Unsur pokok dalam transportasi tersebut, yaitu:

- a. Manusia, yang membutuhkan transportasi.
- b. Barang, yang diperlukan manusia.
- c. Kendaraan sebagai sarana transportasi.
- d. Jalan sebagai prasarana transportasi.
- e. Organisasi sebagai pengolah transportasi.¹¹

Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah di dalam suatu negara. Transportasi mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya misalnya

⁹M Yamin Jinca, *Transportasi Laut Indonesia* (Surabaya: Brilian Internasional, 2011), h. 11.

¹⁰Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), h. 4.

¹¹Joice Ishak, *Disiplin Dalam Menggunakan Transportasi Massal* (Surabaya: CV Kahuripan Grafika, 2019), h. 9.

infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencanaan.¹²

Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Perjalanan adalah pergerakan manusi atau barang antara dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan atau kelompok dalam masyarakat. Perjalanan dilakukan melalui suatu lintasan tertentu yang menghubungkan asal dan tujuan, menggunakan alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu.¹³

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan sistem pemerintahan. Kondisi sosial demografis wilayah suatu negara memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di negara tersebut. Tingkat kepadatan penduduk juga memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Kecenderungan yang terjadi di perkotaan adalah meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi yang berkaitan dengan semakin padatnya penduduk yang secara langsung ataupun tidak langsung mengurangi daya saing dari transpotasi di dalam suatu wilayah.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas Transportasi Umum adalah pemenuhan terhadap kemudahan yang disediakan terhadap penyandang disabilitas berupa alat yang digunakan untuk memindahkan

¹²Asrul dan Rudi Azis, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 1.

¹³Joice Ishak, *Disiplin Dalam Menggunakan Transportasi Massal*, h. 9.

¹⁴Siti Aminah, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan", *Jurnal Universitas Airlangga*, vol. 1 no. 3 (Juni 2015), h. 1.

manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan efektif dan efisien menggunakan suatu angkutan yang digerakkan oleh mesin, hewan, atau manusia itu sendiri. Transpotasi juga sebagai dasar dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan industri. Dengan adanya transportasi menyebabkan spesialisasi dan pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai budaya dan adat istiadat.

Perlindungan yang diberikan Islam tidak memandang individu atau golongan, namun semuanya harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam menaruh kepedulian yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Jenis-Jenis Aksesibilitas Transportasi Umum

a. Jenis-jenis Aksesibilitas

Dalam perkembangannya, penyediaan aksesibilitas itu dapat berupa fisik dan non fisik, antara lain sarana dan prasana umum, serta informasi dan komunikasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama. Hal ini sesuai dengan peraturan standar PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dimana isinya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik sebagai salah satu aspek yang diberikan kepada para penyandang disabilitas adalah penyesuaian desain arsitektur lingkungan fisik dan gedung publik agar penyandang disabilitas dapat bergerak secara leluasa di dalamnya dan dapat menggunakan segala fasilitas yang tersedia tanpa bantuan

¹⁵Rizka Ramadanti, "Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan), h. 22.

orang lain. Aksesibilitas fisik merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang kemandirian para penyandang cacat agar mereka dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan dimasyarakat.¹⁶

2. Aksesibilitas non fisik

Aksesibilitas non fisik merupakan jenis pelayanan informasi yang berupa pelayanan bunyi, suara, atau tulisan yang terdapat atau melekat pada bangunan umum aksesibilitas fisik. Fokus utama dalam menunjang aksesibilitas non fisik yaitu kemudahan dalam pelayanan informasi di bidang perundang-undangan, ketenaga kerjaan, pendidikan, komunikasi, dan teknologi bagi penyandang disabilitas serta memberikan pelayanan khusus dalam mengakses sarana dan prasana transportasi umum.¹⁷

Implementasi aksesibilitas sebagai cara mewujudkan kehidupan yang adil bagi penyandang disabilitas. Aspek teknis implementasi aksesibilitas pada fasilitas khususnya pada fasilitas umum mengacu pada kementerian pekerjaan umum no. 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan. Beberapa hal dasar yang perlu diperhatikan dalam implementasi aksesibilitas tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Ukuran dasar ruang yaitu ukuran-ukuran dasar tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) yang berkaitan dengan ukuran tubuh manusia dewasa dan gerakannya,

¹⁶Didi Tardisi, "Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat", *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, vol. 2 no. 2 (November 2008), h. 10.

¹⁷Haryati Roebyantho, "Implentasi Aksesibilitas Non Fisik Bagi Penyandang Cacat di Enak Provinsi", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 11 no. 1 (Agustus 2017), h. 48

termasuk peralatan yang digunakan, serta ruang yang dibutuhkan untuk mewadahnya.

2. Jalur pedesiran yaitu jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang yang bergerak secara aman, mudah, dan nyaman tanpa hambatan.
3. Jalur pemandu yaitu jalur yang digunakan untuk membantu memberikan informasi perjalanan bagi penyandang disabilitas dengan memanfaatkan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringatan.
4. Ramp yaitu jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu sebagai rute alternatif untuk orang-orang yang tidak mampu menggunakan tangga.
5. Tangga yaitu fasilitas bagi pergerakan vertikal yang direncanakan dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan serta tanjakan dengan kemiringan maksimal 60° dan dengan pegangan rambat minimal satu sisi setinggi 65-80 cm dari lantai.
6. Rambu dan marka adalah fasilitas bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk didalamnya perangkat multimedia dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.¹⁸

b. Jenis-jenis Transportasi Umum

Pada zaman dahulu, orang-orang berpergian hanya dengan berjalan kaki sehingga perjalanan jauh harus ditempuh berbulan-bulan. Selain jarak yang jauh,

¹⁸Harry Kuniawan dkk, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 77.

tempat tujuan tidak dapat dilewati oleh alat transportasi. Dahulu transportasi dikenal dengan nama alat angkut yang dikenal manusia sejak 5.000 tahun yang lalu. Seiring perkembangan teknologi dan budaya, alat angkut juga berkembang.

Alat angkut yang berupa tenaga manusia misalnya tandu yang diperkenalkan pada zaman kerajaan, seperti pada masa kerajaan mesir. Setelah alat angkut ini muncul yang namanya alat pengeret untuk mengangkut bahan pembuat piramid, obelisk, dan patung raksasa yang ditarik diatas tanah, pasir, dan lumpur. Setelah dari alat pengeret muncul alat angkut yang dijalankan oleh binatang yang digunakan di Afrika, Mesir, Laut tengah. Alat angkut yang digerakkan oleh binatang biasanya berupa gajah, kedelai, dan unta.¹⁹

Islam secara tidak langsung mengajarkan beberapa adab berkendara dan berjalan. Mengingat berkendara dan berjalan merupakan bagian dari ruang lingkup transportasi. Adab-adab tersebut dilandasi oleh nilai-nilai universal agama Islam sesuai tujuan-tujuan syariat. Adapun adab-adab tersebut yaitu:

1. Larangan bersikap angkuh
2. Memperhatikan peraturan yang ada
3. Saling membantu dalam berkendara
4. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu kendaraan di jalan²⁰

Pengadaan transportasi berbagai macam bentuk, namun pada intinya adalah perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena kondisi geografis yang beragam dan perkembangan teknologi transportasi

¹⁹Kusnanto, *Menelusuri Sejarah Alat Transportasi* (Semarang: ALPRIN, 2009), h. 6.

²⁰Ziyadul Muttaqin, "Fiqih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam", *Jurnal Tajrih*, vol. 16 no. 1 (September 2019), h 54.

yang semakin berkembang, maka jenis-jenis sarana dan prasarana tertentu akan sesuai dengan kondisi geografis tertentu pula.²¹

Transportasi juga dalam perkembangannya merupakan sumbangan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis transportasi juga beriringan dengan perkembangan kehidupan yang semakin maju dalam pemerataan pembangunan nasional, diantaranya:

- a. Transportasi darat adalah sebuah kendaraan yang digunakan dan beroperasi dengan menggunakan akses baik berupa jalan raya maupun berupa jalur rel. Transportasi darat ini diantaranya:²²
 1. Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang memiliki roda 2 (dua), atau 3 (tiga) baik memiliki atap dan tidak memiliki atap dan tanpa kereta di sampingnya.
 2. Mobil penumpang merupakan kendaraan bermotor yang memiliki sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan perlengkapan pengangkutan bagasi ataupun tidak.
 3. Mobil bus merupakan kendaraan bermotor yang memiliki kapasitas 8 (delapan) tempat duduk atau lebih dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan perlengkapan pengangkutan bagasi ataupun tidak.
 4. Mobil barang merupakan kendaraan bermotor yang khusus untuk mengangkut barang selain dari pada sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.

²¹ Asrul dan Rudi Aziz, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, h. 15.

²² Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), h. 17.

5. Kereta api merupakan sebuah kendaraan lokomotif yang berjalan di rel dan memiliki tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan dengan kendaraan lainnya.
- b. Transportasi laut adalah kendaraan atau alat yang bergerak di atas permukaan air laut untuk memindahkan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan secara efektif dan efisien. Sebelum dapat memanfaatkan teknologi kendaraan laut yang maju seperti sekarang, manusia menggunakan rakit dan sampan sebagai sarana pengangkut penumpang dan barang melalui laut. Dengan adanya dukungan perkembangan teknologi dapat dibuat perahu bermotor, kapal laut berbagai jenis ukuran dan fungsi sehingga keterbatasan kapasitas, jarak tempuh, kecepatan, dan lain-lain dapat diatasi. Sarana kapal ini dibagi menjadi:
1. Tanker
 2. Kapal curah
 3. Kapal kargo umum
 4. Kapal penumpang
 5. Kapal penolong
- c. Transportasi udara merupakan kendaraan yang bergerak di udara dan dilaksanakan dengan menggunakan pesawat terbang baik untuk orang maupun barang dengan cepat dan relatif aman. seperti transportasi yang lain, transportasi udara juga berkembang. Perkembangan teknologi yang ada sudah dapat menciptakan pesawat terbang, helicopter, hidrofoil, dan jenis angkutan udara yang lainnya. Sehingga sekarang transportasi udara mampu mengangkut penumpang dan barang dalam

jumlah yang lebih banyak dengan aman, cepat, dan nyaman untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh.²³

c. Fungsi dan Manfaat Transportasi

1. Fungsi Transportasi

Setidaknya ada dua fungsi transportasi bagi manusia, yaitu transportasi dapat memperlancar hubungan dan interaksi pengangkutan antar desa, kota, wilayah, pulau, dan antar negara. Selain itu, transportasi juga dapat memperlancar arus perpindahan penduduk, serta pengiriman barang dan informasi keseluruhan pelosok tanah air.²⁴

Fungsi transportasi dalam suatu wilayah perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud sarana dan prasarana. Dari sini timbul jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain.²⁵

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi kelancaran pembangunan dalam suatu wilayah. Transportasi yang diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk suatu jaringan prasarana dan pelayanan yang mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Dapat dikatakan

²³Asrul dan Rudi Aziz, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, h. 26.

²⁴Endar Wismulyani, *Transportasi di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), h. 1.

²⁵Amsal, *Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan* (Jakarta: Indocamp, 2018), h. 10.

keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah tergantung pada transportasi yang ada.²⁶

Fungsi transportasi sebagai penunjang pembangunan adalah memberikan pelayanan untuk peningkatan dan pengembangan kegiatan pada sektor-sektor lain, misalnya dalam sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lainnya. Tersedianya sarana dan prasarana jalan menuju kedaerah-daerah produksi komoditas pertanian, yang selanjutnya dipasarkan kedaerah perkotaan. Pengangkutan pemasaran komoditas pertanian dari daerah produksi ke daerah-daerah pasar yang tersebar dapat dilakukan secara lancar, volume penjualan bertambah besar, pendapatan dan keuntungan petani meningkat.²⁷

Dengan demikian, transportasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan manusia dengan cara mengubah letak geografis barang dan manusia. Salah satu tujuan penting dari perencanaan sistem transportasi adalah menuju pada keseimbangan yang efisien antara potensi tata guna lahan dengan kemampuan transportasi. Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan cara melihat kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota, juga memperhatikan kelancaran kegiatan perekonomian kota.²⁸

2. Manfaat Transportasi

²⁶Muh Jusuf Radja, "Reformasi Pelayanan Transportasi Kota Makassar", *Jurnal Ilmiah Bongaya*, vol. 2 no. 19 (April 2016), h. 153.

²⁷Siti fatimah, *Pengantar Transportasi*, h. 6.

²⁸Joice Ishak, *Disiplin Dalam menggunakan Transportasi Massal*, h. 19.

Kegiatan transportasi bertujuan menciptakan manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Transportasi adalah suatu jenis kegiatan meningkatkan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis orang dan barang. Dengan transportasi bahan baku yang dibawa menuju ke tempat produksi dan transportasi jugalah hasil produksi dibawa ke pasar atau ke tempat pelayanan kebutuhan masyarakat.²⁹

Adapun manfaat transportasi meliputi:

a. Manfaat Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak bentuk-bentuk hubungan sosial, seperti hubungan yang bersifat resmi antara lembaga pemerintah dengan swasta, maupun hubungan yang bersifat tidak resmi, seperti hubungan keluarga, teman, dan lain sebagainya. Untuk kepentingan hubungan sosial ini, transportasi memiliki manfaat yang sangat membantu dalam menyediakan berbagai kemudahan. Seperti pelayanan untuk perorangan dan kelompok, perjalanan pribadi dan sosial, mempersingkat waktu tempuh jarak rumah dan tempat kerja, dan mendukung pembangunan kota, serta penyebaran penduduk menjadi rata.

b. Manfaat Ekonomi

Manusia memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Sumberdaya alam ini diolah melalui proses produksi untuk menjadi bahan pokok yang siap diproduksi untuk dipasarkan, dimana didalamnya terjadi proses tukar menukar antara penjual dan pembeli. Produksi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dimana sumberdaya alam dan

²⁹Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, h. 9.

sumberdaya manusia dipadukan untuk menghasilkan barang yang siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan transportasi, bahan pokok dibawa ke tempat produksi, dan dengan transportasi pula hasil produksi dibawa kepasar. Para konsumen datang kepasar atau tempat-tempat pelayanan yang lain dengan menggunakan transportasi.

c. Manfaat Politik

Transportasi memiliki manfaat politik yang penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Beberapa manfaat politik dari transportasi, antara lain sebagai berikut:

1. Transportasi dengan pelayanan yang baik untuk masyarakat diperluas secara merata pada setiap bagian wilayah negara.
2. Transportasi menciptakan sebuah persatuan nasional yang kuat dengan meniadakan isolasi.
3. Transportasi juga memudahkan mobilitas kemampuan pertahanan nasional untuk memindahkan pasukan selama perang demi keamanan suatu negara.
4. Manfaat transportasi memungkinkan perpindahan penduduk dari daerah bencana dengan efisien.³⁰

d. Manfaat Fisik

Sebagai sarana penghubung, transportasi sangat mendukung perkembangan kota dan wilayah. Rencana tata guna lahan di kota harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi

³⁰Joice Ishak, *Disiplin dalam Menggunakan Transportasi Massal*, h. 21

perkembangan kota yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Dengan demikian transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota dan wilayah.³¹

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan hidup yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan di dalam masyarakat, tak terkecuali para Penyandang Disabilitas. Dikalangan masyarakat, ada sedikit kekeliruan dalam penamaan Penyandang Disabilitas. Biasanya mereka menyebut penyandang Disabilitas sama dengan Penyandang Cacat yang memiliki arti kurang baik jika dilekatkan kepada manusia.

Pergaulan yang dialami sejak dalam lingkungan keluarga hingga masyarakat luas menghasilkan pengetahuan untuk melakukan kebebasan apa saja, ternyata sulit diwujudkan karena kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain di dalam masyarakat. Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang merupakan akumulasi dari pengalamannya sejak hingga dewasa. Semua pengalaman akan menyandarkan dirinya bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebenarnya harus berpedoman pada suatu aturan yang harus dipatuhi dan ditaati sebagai pegangan hidup masyarakat.³²

³¹Amsal, *Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan*, h. 12.

³²Nila Sastrawaty, "Hukum Sebagai Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan", *Jurnal al-Daulah*, vol. 1 no. 1 (Desember 2012), h. 87.

Dalam *The International Classification of Impairment Disability and Handicap*, ada tiga definisi yang berkaitan dengan disabilitas, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* merupakan kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* merupakan suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* merupakan suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial dan budaya.³³

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, Mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu yang lama atau bahkan seumur hidupnya yang dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya memiliki hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³⁴

Penyandang disabilitas yang memiliki masalah Hambatan fisik, mental, intelektual atau sensorik, sehingga menghambat aktivitas mereka di dalam masyarakat yang berdasarkan kesetaraan pada umumnya. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat utama. Dengan adanya semangat reformasi dan demokratisasi yang menjunjung tinggi

³³Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2016), h. 18.

³⁴Ari Pratiwi dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Malang: Tim UB Press, 2018), h. 7.

Hak Asasi Manusia, maka para penyandang disabilitas adalah makhluk sosial yang memiliki kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Dalam segala aspek kehidupan bernegara.³⁵

Pada *Convention On The Right Person With Disabilities di article 1 tentang Purpose*, yaitu: “*Person with disabilities include those intellectual or sensory impairments which in their full and effective participation in society on an equal basis with other.*” Penyandang Disabilitas dijelaskan sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain.³⁶ Makna penyandang Cacat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat dalam badan, benda, batin, atau akhlak.³⁷

Pada dasarnya, baik buruknya suatu masyarakat tergantung kepada baik buruknya keluarga-keluarga dan baiknya suatu keluarga tergantung kepada baiknya individu-individu dalam keluarga, sedangkan baiknya individu tergantung kepada pembawaan dan lingkungan yang baik. Akan tetapi, masalah masyarakat manusia tidak seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati yang mudah ditebak sebab musabahnya. Masyarakat manusia amat banyak

³⁵Fajri Nursyamsi, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: PSHIK, 2015), h. 10.

³⁶Nur Syarif Ramadhan dan Firman Umar, “Efektifitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar”, *Jurnal PPKn FIS UNM*, vol. 1 no. 1 (Agustus 2018), h. 138.

³⁷<http://kbbi.web.id/cacat>, diakses tanggal 22 Juni 2020 pukul 19.01 WITA.

faktornya dan sulit menebak sebab akibatnya. Ukuran baik buruknya memang sering terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain.³⁸

Disabilitas merupakan isu multisektor dan tidak hanya terikat pada sektor sosial saja. Isu disabilitas juga berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan sektor lainnya. Hal ini merupakan penyebab perubahan yang akan dilakukan kedepan haruslah saling beriringan dan harmonis, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Saat ini isu Disabilitas dilekatkan hanya sektor sosial, sehingga *leading sector* pemerintah untuk isu disabilitas adalah kementerian sosial. Paradigma itu harus segera diperbaharui dengan melekatkan isu disabilitas pada beragam sektor yang lain. Kondisi saat ini, ada beragam macam kebijakan yang berkaitan dengan isu disabilitas, tetapi keberadaan kebijakan itu masih saling terpisah, bahkan tidak seharmonis dengan yang lainnya.³⁹

2. Disabilitas dalam Perspektif Islam

Islam memandang penyandang disabilitas itu sama dengan masyarakat lainnya, apapun latar belakang sosial dan bentuk fisiknya. Kemudian dalam redaksi ayat-ayat al-qur'an tentang penyandang disabilitas yang sama jika ditinjau dari bahasanya memiliki arti cacat fisik. Secara konteks al-qur'an menyebut hal itu bukan untuk bermaksud menunjukkan kecacatan fisik. Bahasa yang dipergunakan al-qur'an adalah menggambarkan dari sisi negatif seseorang yang tidak beriman dan bermoral. Karena waktu itu budaya Arab memandang buta, tuli,

³⁸Kurniati, "FIQHI CINTA: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga", *Jurnal al-Daulah*, vol. 1 no. 1 (Desember 2012), h. 13.

³⁹Fajri Nursyamsi dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), h. 13.

dan bisu sangat mewakili kondisi sosial masyarakat pada waktu itu.⁴⁰ Dengan kata lain, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, atau bahkan fisik seseorang, yang membedakan di antaranya manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.⁴¹

Para penegak hukum secara tekstual menjadi relevan sebagai pelaksana kedaulatan Tuhan untuk menerapkan hukum-hukumnya, tetapi juga sebagai fungsi kedaulatan negara karena penegak hukum mewakili negara dalam memutuskan perkara bagi pihak yang bersengketa. Selain itu, penegak hukum juga sebagai pelaksana kedaulatan hukum, oleh karena mewakili Tuhan di bumi dalam melaksanakan hukum Tuhan. Penegak hukum bertanggung jawab kepada Tuhan dari segi administrasi dan legalitas dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁴²

Sebagai bangsa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, bahkan terbesar di dunia. Kajian tentang keberadaan penyandang disabilitas perlu dilihat dalam perspektif al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Hal ini karena al-Qur'an selama ini belum tampak perhatian khusus terkait persoalan penyandang disabilitas. Faktor yang menyebabkan kurangnya kajian mengenai persoalan ini boleh jadi disebabkan karena pengkaji atau penafsir yang muncul dari kalangan penyandang disabilitas itu sendiri. Sebagaimana dalam kajian keilmuan klasik

⁴⁰Mohammad Yazid Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang", *Jurnal Islamic Akademika*, vol. 1 no. 6 (Maret 2019), h. 120.

⁴¹Akhmad Sholeh, "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Indonesia", *Jurnal Palastren*, vol. 8 no. 2 (Desember 2015), h 310.

⁴²Sabri Samin, "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum", *Jurnal al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014), h. 18.

lain, seperti dalam bidang akidah, tasawuf filsafat, maupun hadist. Hal ini sebanding dengan adanya ulama klasik mengenai perempuan yang oleh sebagian kelompok dinilai banyak menunjukkan adanya diskriminasi. Tentu saja persoalan ini dikarenakan pengkaji atau penafsir perempuan sangatlah jarang ditemukan dalam sejarah islam, terutama sepeninggal Nabi Muhammad saw.⁴³

Keberadaan penyandang disabilitas dalam ayat-ayat al-qur'an sangat sedikit yang disebabkan karena islam sangat memandang netral setiap manusia tanpa adanya perbedaan. Dengan kata lain, kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang utama, melainkan kebersihan hati dan kekuatan iman yang dimiliki manusia. Begitulah islam lebih menekankan pentingnya amal dan perbuatan-perbuatan baik.⁴⁴

Persoalan disabilitas di dalam Islam merupakan persoalan yang sangat langka untuk dikaji lebih dalam karena kurangnya pemikir Islam klasik dari penyandang disabilitas dan penyediaan kebutuhan aksesibilitas terhadap fasilitas atau sarana umum yang tidak memperhatikan penyandang disabilitas.⁴⁵

Maqashid al-syar'iyah memandang orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik di dunia dan di akhirat. Agama Islam memberikan tuntunan atau cara beribadah bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab fiqh baik di dalam urusan ubudiyyah, muamalah

⁴³Mohammad Zaenal Arifin, "Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran", *Jurnal Dirasah*, vol. 3 no. 2 (Agustus 2020), h. 169.

⁴⁴Khairunnas Jamal dkk, "Eksistensi kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, vol. 25 no. 2 (Desember 2017), h. 229.

⁴⁵Toni Pransiska, "Kejayaan Islam Dan Kontribusi Para Muslim Difabel", *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, vol. 5 no. 2 (Juli 2017), h.165.

maupun yang lain. *Maqashid al-syari'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian, hukum islam bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas.⁴⁶

Memahami *maqashid al-syari'ah* adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui maslah dari setiap hukum yang ditetapkan Allah swt. Dengan demikian, karena pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu pengembangan hukum Islam merupakan hal yang mutlak untuk merespon segala perubahan dan perkembangan zaman.⁴⁷

3. Jenis-Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas atau orang yang berkebutuhan khusus, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang dimana semuanya memerlukan bantuan untuk hidup berdampingan dengan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan kemampuannya yang berbeda-beda, penyandang disabilitas dibedakan menjadi beberapa kelompok menurut definisi dan karakternya:

a. Pengguna Kursi Roda

Pengguna kursi roda adalah orang yang menggunakan kursi roda dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Luasnya jangkauan aktivitas bagi

⁴⁶M Khoirul Hadi, "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah", *Jurnal Palastren*, vol. 9 no. 1 (Juni 2019), h. 4.

⁴⁷Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'yah", *Jurnal Al-Daulah*, vol. 4 no. 2 (Desember 2015), h. 347.

pengguna kursi roda akan sangat tergantung pada akses yang diperoleh mereka dari kursi roda tersebut.

b. Tunadaksa

Tunadaksa atau yang sering disebut juga sebagai orang yang mengalami cacat pada tubuh adalah orang dengan kondisi dimana mereka mengalami kondisi fisik yang berbeda namun dapat berjalan atau bergantung pada anggota tubuh buatan, tongkat, atau alat bantu lainnya. Kategori tunadaksa ini juga memasukkan orang yang mengalami kesulitan dan ketidakmampuan fisik untuk menjalankan kehidupannya atau mengakses bangunan tanpa bergantung pada jenis alat apapun.

c. Tunanetra

Tunanetra atau orang yang mengalami gangguan penglihatan adalah orang yang kehilangan penglihatan sebagai akibat dari penyakit, trauma, atau bawaan sejak lahir yang tidak dapat diobati melalui cara-cara konvensional dan operasi sehingga mereka mengalami kondisi gangguan penglihatan hingga buta. Orang yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra cukup mudah dikenali saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan keterbatasan ini, orang yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra membutuhkan alat bantu untuk beraktivitas seperti tongkat atau anjing pemandu. Keduanya bertujuan untuk menggantikan fungsi penglihatan dengan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan disekitarnya.

d. Tunarungu

Tunarungu atau orang yang memiliki gangguan pendengaran adalah kondisi dimana telinga mengisolasi penderitanya. Tunarungu atau gangguan

pendengaran secara umum dapat dipahami sebagai kondisi hilangnya pendengaran dari yang ringan hingga berat atau tuli. Efek ketulian tersebut dangat halus dan luas jangkauannya, mulai dari gangguan pada kemampuan berbicara dan berkomunikasi, linguistik, dan kemampuan akademik.

e. Tunanetra sekaligus Tunarungu

Tunanetra sekaligus Tunarungu adalah kondisi dimana seseorang mengalami gangguan kehilangan penglihatan dan pendengaran di saat bersamaan sangat jarang ditemui melakukan aktivitas seorang diri. Pada umumnya, mereka akan didampingi seseorang yang akan menjadi media tranfer informasi dalam aktivitasnya.

f. Tunawicara

Tunawicara adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, kecepatan, dan ketepatan berbicara, serta produksi suara yang kurang jelas saat berbicara.

g. Orang lanjut usia

Orang lanjut usia atau biasa disebut sebagai lansia adalah orang-orang yang memiliki umur diatas 50 tahun. Pada rentang usia seperti ini, mereka mengalami penurunan berbagai fungsi dan kemampuan anggota tubuh. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa mereka yang memasuki fase lanjut usia akan kembali seperti anak-anak karena ketidakmampuannya melakukan aktivitas seperti orang dewasa. Selain penurunan kondisi fisik, lansia juga mengalami ketidakmampuan dalam mengolah emosionalnya seiring dengan bertambahnya

usia. Berdasarkan kondisi tersebut, para lansia memiliki poin krusial yang harus diperhatikan dalam merancang fasilitas atau hunian.⁴⁸

h. Anak-anak dan orang kerdil

Anak-anak adalah seorang yang berusia muda, terutama diantara masa kanak-kanak dan pemuda. Sedangkan orang kerdil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang selalu kecil atau tidak dapat menjadi besar karena kekurangan gizi atau karena keturunan.⁴⁹ Kriteria yang mendasari anak-anak dan orang kerdil ditempatkan dalam kelompok Disabilitas karena mereka memiliki posisi yang rendah dari kebanyakan orang lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh ukuran tubuh mereka yang kecil dari orang dewasa. Kondisi ini juga menyebabkan jangkauan dan ketinggian pandangan menjadi terbatas.

Secara eksplisit tidak ditemukan term dalam al-Qur'an yang menunjukkan makna cacat, tapi memberikan indikasi makna bagian dari kategori penyandang disabilitas. Dengan bantuan aplikasi al-Qur'an digunakan beberapa kategori penyandang disabilitas, yaitu:

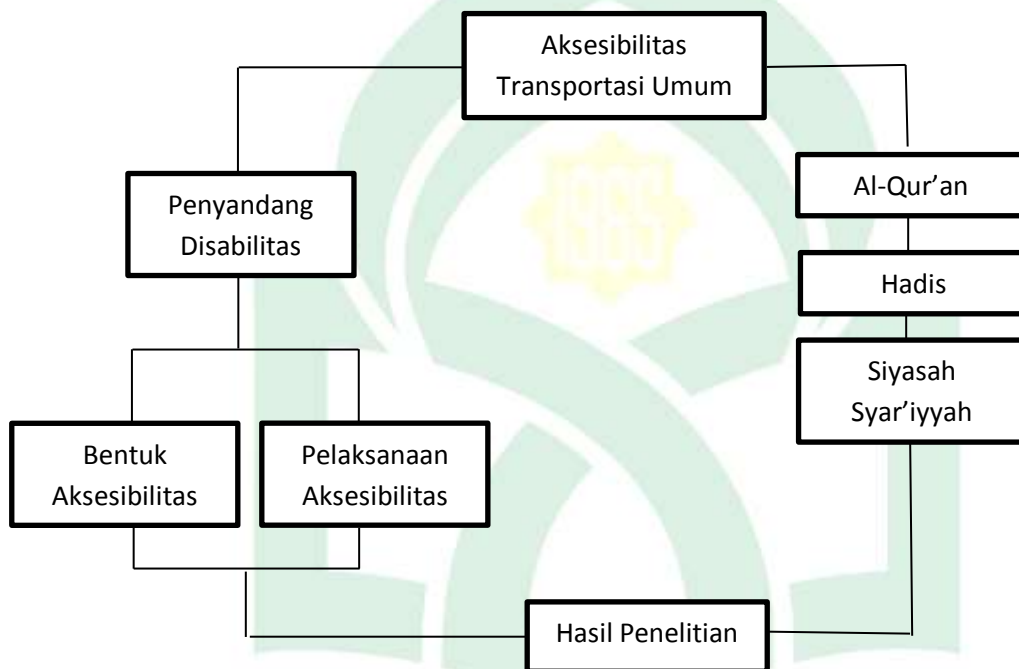
1. *Umyun* yang memiliki arti buta atau tunanetra dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam kamus *Mustahat al' Ulūm al Itjmā'iyah al Injilzīy wa al' Arabī* berarti suatu keadaan terhambatnya penglihatan yang mencakup kebutaan total ataupun karena keadaan lain yang mendekatinya.
2. *Summun* yang memiliki arti seseorang yang memiliki sumbatan atau gangguan pendengaran pada telinga.

⁴⁸Harry Kurniawan dkk, *Perancangan Aksesibilitas Untuk fasilitas Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 39.

⁴⁹<http://kbbi.web.id/kerdil>, diakses tanggal 10 Juli 2020 pukul 22.36 WITA.

3. *Bukmun* yang memiliki arti sebagai seseorang yang memiliki gangguan pada kemampuan berbicara.
4. *A'raj* yang memiliki arti sebagai seseorang yang berjalan pincang atau memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap.⁵⁰

C. Kerangka Konseptual



⁵⁰Khairunnas Jama dkk, "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an", h. 224.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif lapangan (*field reseasch*) yang digunakan adalah memberikan gambaran situasi dan kejadian yang sistematis, melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian.¹ Tujuan dari penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*) yaitu untuk mengungkap fenomena sosial atau berbagai masalah yang muncul dilapangan. Selain itu juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi permasalahan.

Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang **“Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif Siyasaah Syar’iyyah”**.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan, serta jalan dan kotanya. Dalam penenlitian ini mengambil lokasi di wilayah Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Memilih lokasi tersebut karena

¹A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 43.

dengan pertimbangan bahwa banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Makassar.

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian Sulawesi Selatan pada titik koordinat $119^{\circ}, 19', 27', 97''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}, 8', 6', 19''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar $175,77 \text{ km}^2$ yang meliputi 14 Kecamatan.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5-10 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar memiliki luas wilayah $175,77 \text{ km}^2$ yang terbagi ke dalam 14 Kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Adapun pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau kurang lebih sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarang disebut juga pulau-pulau Pabbiring adalah Pulau Lanjutan (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat).

Penduduk Kota Makassar tahun 2020 1.508.154 jiwa yang terdiri dari 746.951 laki-laki dan 761.203 perempuan. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut Kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Biringkanaya 214.432 dari total penduduk, Kecamatan Tamalate 201.908, Kecamatan Mariso 60.130, Kecamatan Mamajang 61.338, Kecamatan Rappocini 168.345, Kecamatan Makassar 85.311, Kecamatan Ujung Pandang 28.883, Kecamatan Wajo 31.297, Kecamatan Bontoala 57.009, Kecamatan Ujung Tanah 35.354, Kecamatan Sangkarang 14.458, Kecamatan Tallo 140.023, Kecamatan Panakukang 149.121, Kecamatan Manggala 145.873, Kecamatan Tamalenrea 114.672.

Sedangkan penyandang disabilitas di Kota Makassar menurut data sensus BPS sebanyak 93.629 jiwa yang terdiri dari 81.401 laki-laki dan 12.228 perempuan. Dari data tersebut terdapat 43.612 penyandang disabilitas tunanetra, 13.151 penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara, 13.587 penyandang disabilitas tunadaksa, 11.908 penyandang disabilitas grahita, 11.371 penyandang disabilitas ganda.

B. Pendekatan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara pendekatan yuridis yang merupakan pendekatan yang melihat aturan-aturan yang berlaku dalam hukum kemudian menghubungkan dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara pendekatan teologis normatif (syar'i) yang merupakan pendekatan dengan menggunakan al-Quran dan Hadist yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan menelaah konsep hukum yang digunakan untuk mengetahui gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, kedua data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi selatan dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui rencana, strategi maupun visi misi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan transportasi umum di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Untuk memperoleh peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengelolaan transportasi umum yang akan dilaksanakan

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian melalui serangkaian kegiatan, seperti:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pengamatan secara langsung aktivitas objek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dalam melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Digunakan metode ini dengan maksud untuk mengetahui kenyataan yang ada dilapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksud untuk mendapat data yang efektif mengenai “Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif *Siyasah Syar'iyah*”.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan informasi dengan proses tanya jawab antara dua orang secara langsung, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan pewawancara. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan langsung dengan sampel dari Dinas Perhubungan, Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data atau informasi yang didapat dari dokumen-dokumen, gambar, atau tulisan keputusan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi digunakan sebagai alat bukti dan data akurat sehingga penelitian ini lebih akurat dalam memberikan penjelasan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seperangkat alat yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri sebagai instrumen pertama.
2. Pedoman Wawancara/ daftar pertanyaan

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi yang berupa daftar pertanyaan.

3. Alat Tulis

Alat tulis adalah alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

4. Alat Perekam

- a. Kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar dan dokumentasi pada saat penelitian.
- b. Tap Recorder adalah alat perekam suara yang digunakan untuk merekam hasil wawancara dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan metode untuk memproses data-data yang dikumpulkan dari lapangan sesuai dengan tujuan dan rancangan peneliti.

Langkah-langkah teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Editing Data adalah Kegiatan memeriksa kembali data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data dalam menemukan jawaban.
- b. Klarifikasi Data adalah istilah yang menunjukkan kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah diterapkan.
- c. Reduksi data adalah memilih dan mengurangi data yang sesuai dengan topik penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan hal apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang perlu diceritakan kembali.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian dijelaskan pada bidang keilmuan data maka suatu penelitian dituntut untuk bisa memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan akhir, artinya suatu penelitian ketika telah memenuhi standar maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi atau validasi silang kualitatif. Triangulasi adalah menilai atau mengkaji

ketercukupan data yang didasarkan pada penggabungan sumber data dan prosedur data yang jamak, atau dengan kata lain triangulasi merupakan pengecekan kembali data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.² Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian di analisis dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari teknik wawancara di cek dengan teknik observasi. Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh untuk mengatur validasi hasil penelitian. Peneliti di tuntut meningkatkan ketentuan dalam meneliti, pengamatan yang cermat dan bersinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 372.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Aksesibilitas transportasi umum adalah kemudahan atau kelancaran dalam menggunakan kendaraan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan aktivitas atau pekerjaan masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam penerapan aksesibilitas, pemerintah harus melihat segala aspek agar semua masyarakat dapat menikmati tanpa adanya diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Penyelenggaraan aksesibilitas transportasi umum wajib mengupayakan sarana dan prasarana yang diperlukan dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi kepada masyarakat.

Penyandang disabilitas adalah orang atau sekumpulan orang yang menderita keterbatasan pada fisik dan mental yang diakibatkan karena suatu sebab dari lahir atau kecelakaan sehingga dapat membatasi aktivitas sehari-hari. Maka dari keterbatasan itu mereka sangat membutuhkan perhatian lebih dibanding masyarakat lainnya.

Aksesibilitas transportasi umum dikatakan baik untuk penyandang disabilitas jika memenuhi hak-hak mereka, seperti yang terlampir pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Bab II Pasal 2 yang berbunyi: pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, non diskriminasi, kesetaraan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam peri kehidupan, hukum, kemandirian, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, kegunaan, dan ilmu pengetahuan.¹ Kemudian dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa penyelenggaraan jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. Guna melaksanakan pelayanan, penyelenggaraan jasa layanan harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.²

Berdasarkan regulasi bisa dilihat bahwa pemerintah Kota Makassar telah berusaha dalam memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga Negara. Adanya regulasi dari pemerintah Kota Makassar sudah dianggap berhasil dalam menjalankan sebuah kebijakan karena telah mempunyai payung hukum. Akan tetapi dari aspek implementasi bentuk aksesibilitas penyandang disabilitas belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat melalui:

¹Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Bab II Pasal 2, h. 11.

²Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang *Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus*, Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2), h. 8.

1. Aksesibilitas Halte

Halte dalam pengembangan fasilitas umum merupakan bangunan yang disediakan pemerintah untuk mempermudah akses terhadap alat transportasi umum bagi semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Di dalam Keputusan Direktorat Jendral Dinas Perhubungan Darat Nomor 271 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum pada Bab I ketentuan umum dijelaskan bahwa halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.³

Pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 30 telah dijelaskan bahwa aksesibilitas halte yang baik bagi penyandang yang berkebutuhan khusus, yaitu:

1. Sarana transportasi atau angkutan umum yang aksesibel
2. Tangga naik atau turun
3. Akses ke, dari dan di dalam sarana angkutan umum berupa pedestrian dan ramp
4. Tempat parkir dan tempat turun penumpang
5. Handrail
6. Tempat duduk atau istirahat

³Republik Indoensia, Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 271 tahun 1996 *Tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang umum*, Bab I Ketentuan Umum, h. 1.

7. Toilet

8. Tanda-tanda atau signage

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan dan membangun aksesibilitas transportasi umum yang aman dan nyaman digunakan oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yan Erwin Renpe, Selaku analis angkutan darat mengatakan bahwa:

“Kami dari dinas perhubungan telah menyediakan halte yang aksesibel untuk mempermudah bagi penyandang disabilitas yang ingin menggunakannya. Disamping itu kami juga telah menyediakan jalurnya yang miring (pedesiran dan ramp), dan pegangan (handrail) yang nyaman bagi mereka dalam menggunakan di halte tersebut. Dan sebagaian besar kami sudah mengakomodasi pembangunan aksesibilitas halte yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.”⁴

Pemerintah telah menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan juga telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun pelaksanaan peraturan tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan sehingga terkesan mengabaikan hak penyandang disabilitas. Tidak semua aksesibilitas transportasi umum khususnya halte menyediakan aksesibilitas seperti ruangan tunggu halte yang luas sehingga menyulitkan bagi pengguna kursi roda untuk melakukan rotasi, tidak adanya petunjuk informasi yang berupa papan

⁴Yan Erwin Renpe, *Analisis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

penanda dan visualisasi suara bagi mereka penyandang tunanetra dan tunarungu, serta adanya space yang lebar antara halte dan bus saat berhenti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ardian Saputra liman, penyandang disabilitas tunadaksa Mengatakan bahwa:

“Bentuk (desain) halte yang dibangun pemerintah Kota Makassar kurang pas dan masih belum bisa dikatakan layak digunakan bagi kami. Area di atas halte masih kurang luas untuk kami para penyandang kursi roda, yang mengakibatkan kami susah untuk bergerak di atas halte pada saat ingin menaiki bus, kemudian jalur jalanan (pedesiran atau *Guiding Block*) yang ada belum sepenuhnya langsung menuju halte. Dan penjagaan dari petugas halte yang tidak ada menyulitkan bagi kami pengguna kursi roda. Jalur miring halte (ramp) yang dibangun juga sangat curam dan ketika menaiki jalur miring halte (ramp) kadang-kadang trotoar penyambungannya rusak, hal ini juga sangat menyulitkan bagi kami untuk mengakses hate bus Trans *Mamminasata*.”⁵

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Muhammad Lutfi, penyandang disabilitas tunanetra. Berdasarkan hasil wawancara:

“Jalur (aksesibilitas) bagi kami (penyandang disabilitas) tunanetra di halte tersebut masih jauh dari kata layak pakai bagi kami. Jalur pemandu yang biasanya kami pakai (para penyandang disabilitas) malah ditempati berjualan dan parkir liar, kemudian jika akan menaiki bus trans *Mamminasata* masih ada jarak antara bibir halte dengan bus yang lumayan lebar, hal ini membuat kita susah untuk mengakses masuk kedalam bus. Tidak adanya pelayanan audio dari pihak Trans *Mamminasata* yang menyebabkan kami sulit mendapatkan informasi, serta tidak adanya petugas yang berjaga dihalte sebagai pembantu kami naik kedalam bus.”⁶

Sampai saat ini jika dilihat dari segi aspek dan struktur hukum, pembangunan halte di Kota Makassar masih belum tergolong sebagai aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Lemahnya penegakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota menyebabkan rendahnya tingkat ketersediaan

⁵Ardian Saputra Liman, Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

⁶Muhammaad Lutfi, Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

aksesibilitas transportasi umum. Para penyandang disabilitas berhak memanfaatkan aksesibilitas transportasi umum sebagai perwujudan kemandirian dan kesejahteraan yang sama seperti masyarakat pada umumnya, oleh karena itu pemerintah Kota Makassar wajib untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dengan melengkapi setiap aksesibilitas transportasi umum yang ada, agar dapat mempermudah aktivitas sehari-hari mereka.

2. Bus Trans *Mamminasata*

Bus Trans *Mamminasata* adalah salah satu sarana transportasi yang merupakan salah satu bagian dari program penerapan Bus Rapid Transit (BRT) yang direncanakan oleh Kementerian Perhubungan yang menuju tiga Kota, yakni Padang, Surabaya, dan Makassar pada tahun 2011. Tetapi baru beroperasi pada tahun 2014 di Kota Makassar dengan koridor pertama yang dibuka pada rute Mall GTC-Mal Panakukang. Konsep pengembangan Trans *Mamminasata* dikembangkan bukan sebagai alat transportasi yang melayani masyarakat masyarakat secara konvensional, tetapi Trans *Mamminasata* dirancang untuk memenuhi kebutuhan bagi para pengguna jasa yaitu aman, nyaman dan murah sebagai prinsip dasar Trans *Mamminasata*.

Sebagai sarana transportasi umum yang terbilang murah dan menjangkau seluruh kawasan Kota Makassar, Kehadiran Trans *Mamminasata* dengan segala kenyamanannya disambut hangat oleh semua masyarakat Makassar, termasuk para penyandang disabilitas. Apalagi Trans *Mamminasata* hadir dengan sarana-sarana yang sangat aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Hal ini diperkuat

oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi sarana dan prasarana keselamatan jalan UPT Trans *Mamminasata*, Agustina Widyati mengatakan bahwa:

“Ketika mereka (penyandang disabilitas) naik kedalam bus, mereka akan dibantu oleh petugas bus. Dan di dalam bus kita sudah sediakan tempat duduk khusus sebagai akses bagi penyandang disabilitas agar mereka memudahkan untuk keluar masuk kedalam bus. Kami juga sudah menerapkan semua peraturan dari Dinas Perhubungan untuk segi sarana dan prasarana, termasuk dalam pengembangan bus Trans *Mamminasata* yang ramah bagi penyandang disabilitas.”⁷

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Menurutnya, pembangunan aksesibilitas pada bus Trans *Mamminasata* telah memenuhi standar bagi penyandang disabilitas, termasuk dari segi akses yang sudah terpenuhi. Meskipun telah dijelaskan dengan baik bahwa aksesibilitas pada Trans *Mamminasata* telah memenuhi standar yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, tetapi dalam penerapannya para penyandang disabilitas masih merasa belum cukup puas dengan aksesibilitas yang ada, seperti wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas tunanetra bernama Muhammad Lutfi yang mengungkapkan:

“Bus Trans *Mamminasata* masih jauh dari kata layak pakai (aksesibel) bagi kami para penyandang disabilitas. Sebagai contoh ketika saya menaiki bus saya tidak mengetahui dihalte mana bus ini akan berhenti karena didalam bus belum adanya penyampaian secara langsung melalui suara dari audio maupun dari petugas bus. Didalam bus, tidak adanya pengamanan pengait yang mengunci roda di kursi roda membuat saya terombang ambing dan tidak stabil ketika bus tiba-tiba berhenti. Dan ketika turun dari bus, para petugas bus tidak menuntun kita turun untuk

⁷Agustina Widyati, Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Keselamatan Jalan UPT Trans Mamminasata Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

melewati celah antara bus dengan halte, yang kadang-kadang saya sendiri hampir jatuh.”⁸

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat pengguna Trans *Mamminasata* bernama Zulkifli yang mengungkapkan:

“Dalam perjalanan bus Trans *Mamminasata* tidak adanya upaya dari petugas yang berjaga di dalam bus sangat berpengaruh bagi penyandang disabilitas, karena biasanya masih ada penumpang yang ditemukan di dalam bus yang memanfaatkan area tempat duduk atau space untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda sebagai tempat penyimpanan barang bawaan. Hal ini menjadi pemandangan yang kurang mengenakan yang terjadi di dalam bus Trans *Mamminasata*.”⁹

Dari uraian diatas, terlihat bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Makassar masih belum optimal. Padahal dalam Peraturan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan, dengan adanya pelayanan yang masih belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah Kota Makassar dirasa kurang mewujudkan kesempatan dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, karena yang ideal adalah pemerintah wajib menciptakan suatu layanan yang aksesibel bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga masyarakat yang menjadi faktor penting terwujudnya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam penyediaan aksesibilitas yang dibuat pemerintah, masyarakat harus sadar pentingnya hak

⁸Muhammad Lutfi, Penyandang Disabilitas Tunanetra, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

⁹Zulkifli, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

penyandang disabilitas, karena masyarakat juga mempunyai peran vital akan adanya penyandang disabilitas.

Dalam sejarah Nabi Muhammad saw juga dikenal tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. ‘Abasa/80:1-4.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ۚ
أَوْ يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ

Terjemahnya:

Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling.(1) karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).(2) Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa).(3) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya? (4)¹⁰

Menurut Tafsir Jalallain, bahwa pada suatu hari datanglah kepada Nabi seseorang tunanetra (buta) bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau dalam sumber lain mengisahkan anak Ummi Maktum bernama Amr Ibnu Qais anak laki-laki paman Siti Khadijah. Dia berkata dengan suara yang agak keras kepada Nabi: “Ajarkan kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” Karena buta maka pada saat itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Nabi sangat menginginkan mereka masuk Islam. Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Ibnu ummi Maktum lalu menuju rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Karena merasa diabaikan, Abdullah

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h.585

Ibnu Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan mengganggu Tuan?” Nabi menjawab: “Tidak”. Maka turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: “Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya,” lalu Nabi menghapuskan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai walikota, dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau da’i ke Madinah.¹¹

Syariat Islam telah memberikan otoritas yang berdasar pada al-Qur’an, hadis nabi begitu pula dengan kaidah-kaidah umum agama kepada seorang kepala negara untuk mengatur kehidupan masyarakatnya baik dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Otoritas kepala negara dalam Islam sangat besar dan luas, maka syariat Islam mewajibkan para pemimpin untuk senantiasa mengambil suatu kebijakan dengan tidak semena-mena agar tidak melanggar kode etik agama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan “sesungguhnya syariat Islam, asas dan bangunannya dalam hal pengambilan keputusan berdasar pada maslahat manusia dalam hidup dan matinya. Syariat Islam yaitu rahmat, adil, hikmah, kesemuanya adalah maslahat”.

Ibnu Nujaim mengungkapkan bahwa “bila kebijakan seorang presiden harus berdasar pada prinsip maslahat dalam setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka setiap kebijakan yang diambil itu dapat dijalankan bila sesuai dengan prinsip maslahat. Namun bila dianggap bertentangan dengan

¹¹Akhmad Sholeh, “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Palastren*, vol. 8 no. 2 (Desember 2015), h. 310.

prinsip maslahat maka tidak boleh dilaksanakan”. Otoritas kepala negara sangatlah luas dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Para ahli hukum Islam mengatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mampu membumikan *al-amr bi al-ma'ruf wa al nahyu al mungkar* yang berfungsi menciptakan kesejahteraan ditengah masyarakat, negara dituntut untuk tetap konsisten pada nilai-nilai *al-amr bi al-ma'ruf wa al nahyu al mungkar*, sehingga otoritas dalam mengambil kebijakan sebagai langkah untuk menjamin tetap terciptanya nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat dengan menghindari hal-hal yang dianggap mungkar. Nilai-nilai kepatutan merupakan hal yang dianjurkan oleh agama terkait dengan masalah perilaku serta bagaimana berinteraksi dengan sesama. Semua itu tidak terlepas dari petunjuk-petunjuk agama baik dari al-Qur'an maupun dari hadis nabi, kemungkaran adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang dilarang oleh Allah maupun nabinya, dan semua yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat termasuk dengan merebaknya kejahatan di tengah masyarakat.¹²

Hak untuk mendapat perlakuan sama merupakan suatu hak yang sangat penting. Agama Islam menjamin semua hak masyarakatnya, termasuk penyandang disabilitas. Nilai nilai yang seharusnya ada didalam fikih siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam suatu kebijakan atau aturan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya sendiri meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau Khalifah. Nilai ini dapat dilihat dalam QS. al-Syūrā/42:38.

¹²Lukman Arake, “Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasah Syar'iyah”, *Jurnal Al-Bayyinah*, vol. 3 no. 2 (Juni 2014), h. 173.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan-seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki dan rezeki yang kami berikan kepada mereka.”¹³

Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslim harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi yang terbaik. Bukan dengan cara suara voting atau suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalahgunakan untuk meluluhkan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas, seperti para penyandang disabilitas yang terjadi saat sekarang.

Dengan demikian, kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Setiap komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Al-Qur'an banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan yang diungkapkan dengan berbagai macam istilah, seperti Khalifah, Imam, dan Ulil al-Amri. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilansir di dalam al-Qur'an antara lain, amanah, adil, syura dan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy al-munkar*. Amanah diartikan dengan kejujuran,

¹³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 488.

kepercayaan. Keadilan adalah keseimbangan. Sementara istilah syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah yang mengandung segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al nahyu al mungkar* adalah suruhan untuk berbuat baik dan mencegah kejahatan.¹⁴

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa terkait bentuk aksesibilitas transportasi umum di Kota Makassar, masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat yang pertama, aksesibilitas pada halte yang masih ada jalur ramp yang curam dan licin sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk menggunakannya. Kemudian handrail atau pegangan pada ramp yang tinggi bagi pengguna kursi roda dan tidak adanya papan penanda dan visual audio atau suara yang menyulitkan tunarungu dan tunanetra dalam mendapat informasi dihalte. Kedua, bus Trans *Mamminasata* yang memiliki jarak yang cukup jauh dengan halte sehingga menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk naik dan turun bus dan kurang tersedianya fasilitas yang lengkap di dalam bus, seperti alat pengunci kursi roda dan kurangnya simpati petugas dalam memperhatikan penyandang disabilitas ketika menggunakan bus Trans *Mamminasata*.

B. Pelaksanaan Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Perkembangan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya pada tempat-tempat umum sudah terlihat banyak bermunculan. Seiring berjalannya waktu, hampir semua elemen dalam masyarakat

¹⁴Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akademika*, vol. 19 no. 1 (Januari 2014), h. 55.

turut andil dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Misalnya saja pada aksesibilitas pada transportasi umum di Kota Makassar. Aksesibilitas transportasi umum yang baik merupakan hal yang paling dibutuhkan para penyandang disabilitas dalam menunjang kenyamanan dan keamanan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Aksesibilitas transportasi umum yang dibangun merupakan suatu kewajiban pemerintah guna menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara, sesungguhnya dapat diwujudkan dalam penyediaan aksesibilitas yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kemandirian, dan kenyamanan kepada para penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan.¹⁵ Selain itu, menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 98 Tahun 2017 Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan.¹⁶ Hal ini juga diungkap melalui hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan UPT Trans Mamminasata, Agustina Widyati yang mengatakan bahwa:

¹⁵Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, BAB I Pasal , h. 6.

¹⁶Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 98 Tahun 2017 *Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus*, BAB I Pasal 1, h. 7.

“Kami dari pemerintah telah menyediakan terkait sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, sebagai contoh aksesibilitas pada transportasi umum melalui bus trans mamminasata di Kota Makassar. Pada pembangunan halte juga, kami juga melibatkan masyarakat dan penyandang disabilitas dalam menentukan lokasi yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat juga terlibat langsung dengan ikut dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun melalui media sosial. Namun, meskipun sudah melibatkan masyarakat dalam pembangunannya, akan tetapi tidak sepenuhnya berjalan secara efektif. Seperti masih belum meratanya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang bus trans mamminasata dan proses pembangunannya, terutama bagi penyandang disabilitas yang diharapkan mampu untuk mengakses bus trans mamminasata.”¹⁷

Hal ini mendapat dukungan dari Edisa Ade Prasatyo Kusnadi selaku Kepala Seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang mengatakan bahwa:

“Dalam Pembangunan aksesibilitas transportasi umum, kita sangat memperhatikan standar pelayanan minimal. Karena setiap Trans Mamminasata wajib memperhatikan dan menyediakan tempat yang nyaman serta aman bagi para penyandang disabilitas, baik itu dari segi sarana dan prasana yang ada di dalamnya. Kami juga selaku pemerintah telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan mengadakan semua keperluan saran dan prasarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.”¹⁸

Aksesibilitas transportasi umum secara umum di bagi menjadi dua. Yang pertama dapat dilihat dari bus nya (*Trans Mamminasata*) dan yang kedua dapat dilihat dari fasilitas di luar bus (*Halte*). Dan dalam pelaksanaannya setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan fasilitas dan transportasi wajib memenuhi prinsip aksesibilitas, seperti

¹⁷Agustina Widyati, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan UPT Trans Mamminasata Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

¹⁸Edisa Ade Prasatyo Kusnadi, Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

yang diungkapkan oleh Yan Erwin Renpe selaku analis angkutan darat yang mengatakan bahwa:

“Ada empat prinsip yang mencakup aksesibilitas. Yang pertama prinsip kemudahan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan untuk semua orang. Yang kedua prinsip-prinsip kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum. Yang ketiga prinsip kegunaan, yaitu setiap orang dapat mempergunakan semua sarana yang dibangun oleh pemerintah. Yang ke empat prinsip kemandirian, yaitu setiap orang bisa mencapai dan menggunakan bangunan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.”¹⁹

Tetapi pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang merasa bahwa pemerintah daerah atau dinas terkait masih belum begitu sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ardian Saputra liman, penyandang disabilitas tunadaksa yang mengatakan bahwa:

“Perlakuan terhadap para penyandang disabilitas dari segi aksesibilitas masih berbeda dengan mereka yang normal. Masih banyaknya permasalahan yang kami alami di halte dan di dalam bus Trans *Mamminasata* membuat kami merasa pemenuhan hak-hak kami belum terpenuhi. Orang-orang yang membuat wewenang tersebut kurang membuat suatu Undang-Undang jangan melihat satu sisi saja, namun harus melihat dari sisi kehidupan kami sebagai penyandang disabilitas, dan juga kepada masyarakat harus berperan besar terhadap diskriminasi yang kami alami sebagai penyandang disabilitas.”²⁰

Kondisi pelayanan pada bus Trans *Mamminasata* dan halte yang masih belum memuaskan bagi para penyandang disabilitas, membuat para penyandang disabilitas terkadang harus berpikir dua kali ketika akan menggunakan alat transportasi umum tersebut, terkadang mereka memilih Trans *Mamminasata*,

¹⁹Yan Erwin Renpe, Analis Angkutan Darat Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

²⁰Ardian Saputra Liman, Penyandang Disabilitas Tunadaksa, *Wawancara*, Makasar, 5 November 2020.

namun dengan kecanggihan teknologi sekarang dan memudahkan para penyandang disabilitas mereka jauh lebih memilih menggunakan transportasi online berbasis aplikasi seperti *Grabcar* dan *Gocar*. Hal ini juga sama disampaikan oleh seorang penyandang disabilitas tunarungu yang bernama Muh Al Urwatul Wutsqa Yasrullah, dalam wawancaranya:

“Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan (halte dan bus) membuat kami masih sangat sulit melakukan kegiatan sehari-hari kami sebagai para penyandang disabilitas. Contohnya seperti tidak adanya papan penanda (informasi), halte juga kebanyakan sekarang tidak aktif dan banyak halte yang rusak, dan jadwal bus yang sekarang tidak menentu yang terkadang saya menunggu hingga berjam-jam tapi bus tidak datang membuat kami para penyandang berpikir dua kali untuk menggunakan Trans *Mamminasata*. Dan kami para penyandang disabilitas jauh lebih sering menggunakan alat transportasi berbasis aplikasi online dari pada menggunakan bus Trans *Mamminasata*.”²¹

Secara umum, pelaksanaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar masih memprihatinkan. Tidak semua tempat aksibel bagi para penyandang disabilitas, masih parsial antara satu tempat ke tempat yang lainnya, komitmen dari peraturan yang masih rendah, serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam merumuskan kebijakan. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat, setiap pembangunan fisik pasti meninggalkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal sudah ada aturan khusus bagi para penyandang disabilitas, tetapi selalu diingkari oleh pemegang kebijakan. Seperti dengan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa jurusan pendidikan luar biasa di Universitas Negeri Makassar bernama Nur Atira Chairunnisa, yang mengatakan bahwa:

²¹Muh Al Urwatul Wutsqa Yasrullah, Penyandang Disabilitas Tunarungu, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

“Meskipun pemerintah Kota Makassar telah memberikan kesempatan yang luas bagi para penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya, ternyata dalam proses yang terjadi kemudian masih banyaknya permasalahan yang terjadi. Kendala yang pertama adalah masalah kesempatan, tidak semua aksesibilitas yang dilakukan sesuai dengan fungsinya. Kendala kedua adalah sarana dan prasarana yang belum aksesibel pada aksesibilitas transportasi umum yang ada. Kendala selanjutnya adalah tenaga sumber daya manusia yang ada, sebagai contoh dalam menghadapi penyandang disabilitas tunarungu, para petugas biasanya kebingungan dalam berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas tunarungu. Kendala-kendala tersebut lah yang membuat pelaksanaan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas masih belum terlaksana dengan baik.”²²

Tuntutan pelaksanaan pemenuhan segera itu merupakan mandat dari beberapa instrumen hukum yang telah berlaku seperti Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak hak penyandang disabilitas. Disamping itu, pemerintah juga harus berusaha untuk membuat suatu sistem yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas agar mereka terjamin dan dilindungi, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang masih terus terjadi pada aksesibilitas transportasi umum. Karena itu, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah Kota Makassar untuk memperbaiki setiap bangunan halte dan transportasi Trans *Mamminasata* yang belum akses bagi penyandang disabilitas. Pemerintah bahkan harus menjadikan standar aksesibilitas sebagai persyaratan yang terikat setiap sarana dan prasarana yang akan dibangun. Hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama seperti masyarakat umumnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan dalam melakukan aktivitas sehari hari mereka.

Penetapan suatu kebijakan harus mendatangkan kemashalatan atau mafsadah yang didasarkan kepada teks-teks dari al-Qur'an dan hadis. Kedua

²²Nur Atira Chairunnisa, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Makassar, 5 November 2020.

sumber ini menetapkan segala bentuk kemashlahatan dan menolak kemudharatan, jika tidak ada pada kedua secara rinci maka diambil melalui ijma dan qiyas. Dalam ranah politik maka kemashlahatan menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitasnya harus didasarkan pada kemashlahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan daripada kemashlahatan yang bersifat individu. Hal ini dipahami karena tujuan utama dari pemerintah atau penguasa adalah mengayomi masyarakat. Sehingga setiap kebijakan apapun yang dilakukan harus membela rakyat dan warga negaranya, termasuk para penyandang disabilitas.

Pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas transportasi umum tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam fikih siyasah yakni nilai amanah dan nilai keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat berdasar pada nilai dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagai mana dengan firman Allah swt dalam QS al-Nisā/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²³

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa fikih siyasah diterapkan oleh seorang khalifah Allah dimuka bumi ini yaitu sistem siyasah yang dibangun

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h.84.

dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi oleh keadilan dan amanah akan sia-sia, tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan dengan kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, kehormatan diri dari seorang pemimpin dengan mempunyai sikap adil, jujur dan meninggalkan semua yang dilarang, melaksanakan semua amanah-amanah dengan perbuatan yang bermanfaat dan menjauhi kerusakan merupakan cerminan dari sebuah pelaksanaan suatu kebijakan yang baik dan menampung semua kepentingan dari rakyat yang di pimpinnya. Berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja melainkan pemimpin juga akan mendapat manfaatnya. Dalam pelaksanaan kebijakan sudah selayaknya setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah didasarkan kepada kemashlahatan warga negaranya. Hal ini bisa di pahami karena tujuan utama dari adanya pemerintah atau penguasa adalah mengayomi masyarakat. Demikian pula dalam membuat dan mngesahkan suatu peraturan perundang undangan atau peraturan daerah, tidak boleh sembarangan dan melanggar norma agama. Sebaiknya, harus memberikan manfaat dan mengayomi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.²⁴

Bentuk-bentuk kedaulatan itu haruslah berpatokan pada kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pokok. Apabila Allah sebagai penguasa yang sebenarnya maka syariah/hukum merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas rakyat

²⁴Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Al-Imarah*, v. 3 no. 1 (Mei 2018), h. 22.

sebagai khalifahnyanya adalah menerapkan hukum syariah. Tugas itu hanya dapat terlaksana melalui kerja sama seluruh masyarakat dalam suatu negara.²⁵

Sudah sepatutnya seseorang yang telah diberikan kekuasaan harus bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaannya, konsep tanggung jawab dalam Islam dinamakan sebagai amanat. Pemimpin maupun pejabat politik yang telah dibebani tanggung jawab dalam kekuasaannya, baik skala kecil atau besar, diwajibkan untuk menjalankan amanat yang berupa kewajibannya dalam memberikan hak-hak yang layak kepada masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Dalam memutuskan suatu kebijakan, pemerintah harus mengeluarkan hukum yang adil bagi semua masyarakatnya, dalam hal ini hukum Islam sebagai bentuk nyata dari implikasi akhlak sebagai alat untuk mempersatukan nilai etika sosial Islam dalam kehidupan manusia demi terciptanya keadilan yang tercermin pada empat hal, yaitu, memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan, meninggalkan cara kekerasan, dan berpegang kepada kebenaran. Konsep keadilan menyeluruh harus menitikberatkan pada kemashalahatan bersama. Seorang pemimpin lebih dituntut untuk cerdas intelektual, kompetensi pada bidangnya, serta dapat melaksanakan proses musyawarah dalam memutuskan suatu kebijakan. Dengan begitu, mereka mampu bekerja dengan maksimal, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang diemban dapat menghasilkan kemashalahatan bagi semua masyarakat, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Adapun di dalam Islam, masyarakat

²⁵Sabri Samin, "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum", *Jurnal al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014), h. 18.

dituntut untuk berbuat baik antar sesama, menaati peraturan yang ada, dan mencegah perbuatan keji dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sangat mengedepankan akhlak yang terpuji dalam diri manusia. Akhlak terpuji yang harus ada pada seorang pemimpin maupun pejabat pemerintahan adalah adil dan bijaksana. Kebikjaksanaan seorang pemimpin mampu memunculkan kewibawaan sehingga masyarakat akan segan kepadanya. Sedangkan keadilan yang diberikan seorang pemimpin akan mampu menghadirkan rasa nyaman dan percaya pada masyarakat terhadapnya. Dengan begitu sosok pemimpin dan pejabat pemerintahan yang adil dan bijaksana sangat dibutuhkan dalam mewujudkan suatu negara yang nyaman dan berkembang menurut pandangan Islam.

Berdasarkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan aksesibilitas transportasi umum di Kota Makassar masih belum optimal. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait halte dan bus Trans Mamminasata membuat hak-hak para penyandang disabilitas di Kota Makassar belum terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, menjadi tugas utama bagi pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama peduli terhadap para penyandang disabilitas guna mewujudkan Kota inklusif dan ramah.

²⁶Farhah dan Achmad Farid, "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam", *Jurnal Dauliyah*, vo. 4 no. 2 (Juli 2019), h. 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah uraian hasil penelitian serta analisa yang dilakukan, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk aksesibilitas transportasi umum di Kota Makassar pada bus Trans Mamminasata masih belum sepenuhnya layak untuk digunakan bagi mereka para penyandang disabilitas. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sarana dan prasarana membuat para penyandang disabilitas masih sangat sulit untuk digunakan oleh para penyandang disabilitas dan pemenuhan terhadap hak-hak mereka masih jauh dari kata terpenuhi.
2. Adapun pelaksanaan aksesibilitas transportasi umum di Kota Makassar yang dilaksanakan pemerintah masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Para penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dengan belum mendapatkan pelayanan yang belum aksesibel dalam menggunakan halte dan transportasi Trans Mamminasata yang membuat mereka masih sangat sulit dalam menggunakannya.

B. Implikasi Penelitian

1. Perlu adanya keseriusan dari pemerintah Kota Makassar dan juga keterlibatan para penyandang disabilitas untuk bersama-sama melakukan evaluasi kembali terhadap bentuk aksesibilitas transportasi umum yang berupa halte dan bus Trans Mamminasata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tak terkecuali para penyandang disabilitas.

2. Dalam membuat suatu aturan tentang aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas, pemerintah terkait wajib menggandeng beberapa organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas yang bergerak dalam advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena tahu persis tentang aksesibilitas dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang ramah.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal sehingga seluruh masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan sarana dan prasarana transportasi umum yang disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

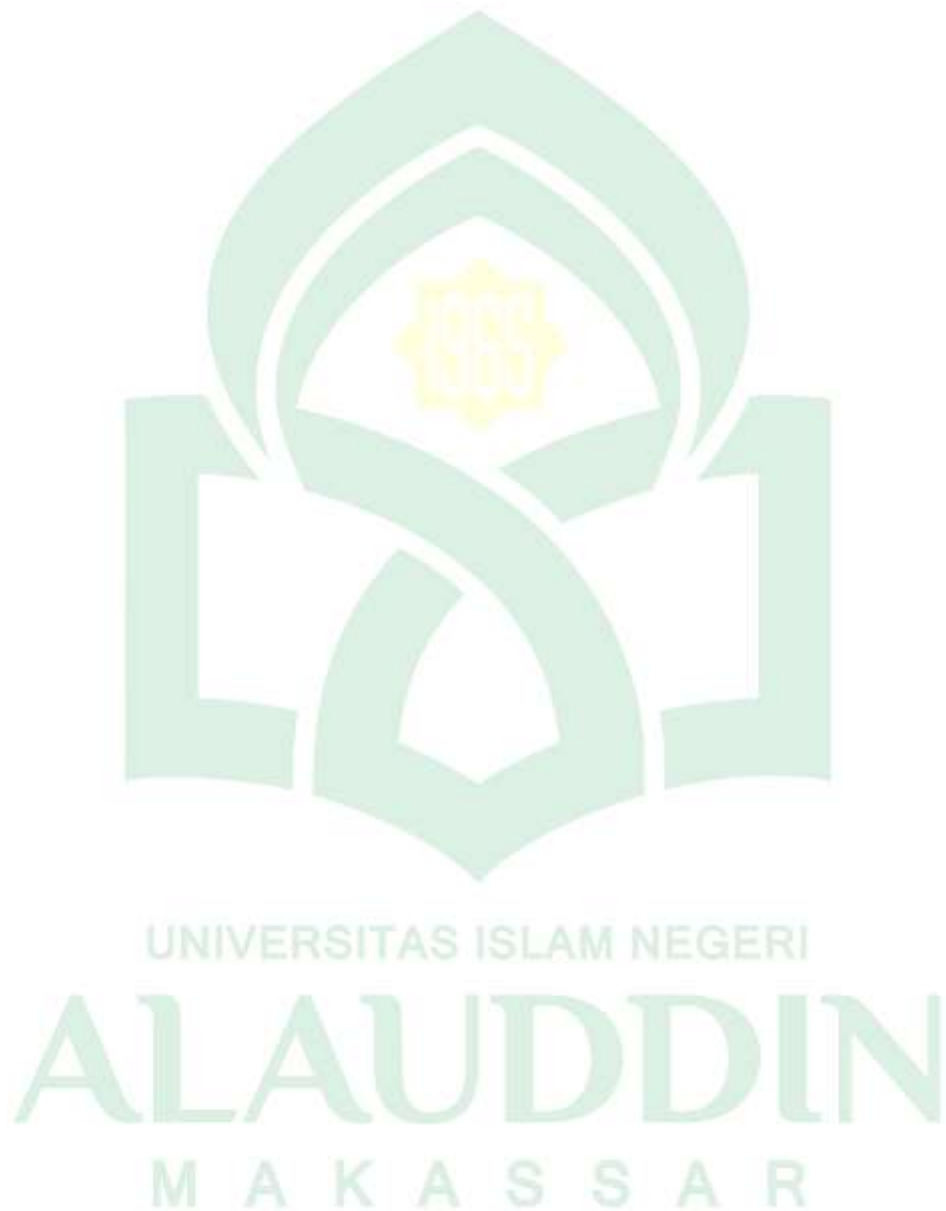
- Adisasmita, Raharjo. *Analisis Tata Ruang Pembangunan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Aminah, S. *Penataan Transportasi Publik-Privat dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).
- Aminah, Siti. "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan", *Jurnal Universitas Airlangga*, vol. 1 no. 3 (Juni 2015).
- Amsal. *Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan* (Jakarta: Indocamp, 2018).
- Arake, Lukman. "Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Jurnal Al-Bayyinah*, vol. 3 no. 2 (Juni 2014).
- Arifin, Mohammad Zaenal. "Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran", *Jurnal Dirasah*, vol. 3 no. 2 (Agustus 2020).
- Asrul dan Rudi Azis. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2014).
- Dewi, Putu Nia Rusmiari. "Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Hukum Kesejahteraan Sosial*, vol. 1 no. 1 (Januari 2017).
- Farhah dan Achmad Farid. "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam", *Jurnal Dauliyah*, vo. 4 no. 2 (Juli 2019).
- Fatimah, Siti. *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019).
- Hadi, M Khoirul. "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah", *Jurnal Palastren*, vol. 9 no. 1 (Juni 2019).
- Haryanti dan Candra Sari, Rina Herlina. "Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta", *Jurnal Spirit Publik*, vol. 12 no. 1 (April 2017).
- <http://kbbi.web.id/cacat>, diakses tanggal 22 Juni 2020 pukul 19.01 WITA.
- <http://kbbi.web.id/kerdil>, diakses tanggal 10 Juli 2020 pukul 22.36 WITA.
- Ishak, Joice. *Disiplin Dalam Menggunakan Transportasi Massal* (Surabaya: CV Kahuripan Grafika, 2019).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Al-Imarah*, v. 3 no. 1 (Mei 2018), h. 22.
- Jamal dkk, Khairunnas. "Eksistensi kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, vol. 25 no. 2 (Desember 2017).
- Jinca, M Yamin. *Transportasi Laut Indonesia* (Surabaya: Brilian Internasional, 2011).

- Jumadi. "Memahami Konsep Konsep Konstitusionalisme Indonesia", *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 3 no. 2 (Desember 2016).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016).
- Kuniawan dkk, Harry. *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).
- Kurniati. "FIQHI CINTA: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga", *Jurnal al-Daulah*, vol. 1 no. 1 (Desember 2012).
- Kusnanto. *Menelusuri Sejarah Alat Transportasi* (Semarang: ALPRIN, 2009).
- Marilang. "Menimbang paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, vol. 14 no. 2 (Juni 2017), h. 317.
- Muaini. *Buku Ajar Kebudayaan dan Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2018).
- Mubarok, Mohammad Yazid. "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang", *Jurnal Islamic Akademika*, vol. 1 no. 6 (Maret 2019).
- Muttaqin, Ziyadul. "Fiqih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam", *Jurnal Tajrih*, vol. 16 no. 1 (September 2019).
- Natsif, Fadli Andi. *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Nursyamsi dkk, Fajri. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015).
- Nursyamsi, Fajri. *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: PSHIK, 2015).
- Pransiska, Toni. "Kejayaan Islam Dan Kontribusi Para Muslim Difabel", *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, vol. 5 no. 2 (Juli 2017).
- Pratiwi dkk, Ari. *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Malang: Tim UB Press, 2018).
- Radja, Muh Jusuf. "Reformasi Pelayanan Transportasi Kota Makassar", *Jurnal Ilmiah Bongaya*, vol. 2 no. 19 (April 2016).
- Rahayu, Irma. "Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar", *Nature*, vol. 5 no. 2 (Januari 2018).
- Ramadanti, Rizka. "Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan).
- Ramadhan dan Firman Umar, Nur Syarif. "Efektifitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar", *Jurnal PPKn FIS UNM*, vol. 1 no. 1 (Agustus 2018).

- Republik Indoensia, Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 271 tahun 1996 *Tentang Pedoman Teknis Perekeyasan Tempa Pemberhentian Kendaraan Penumpang umum*, Bab I Ketentuan Umum.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Bab II Pasal 2.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, BAB I Pasal.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang *Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus*, Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2).
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 98 Tahun 2017 *Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus*, BAB I Pasal 1.
- Ridho, Miftahur. "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas", *Jurnal Al-Bayan*, vol. 23 no. 1 (Juli 2017).
- Roebyantho, Haryanti. "Implentasi Aksesibilitas Non Fisik Bagi Penyandang Cacat di Enak Provinsi", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Usaha Kesehjateraan Sosial*, vol. 11 no. 1 (Agustus 2017).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum", *Jurnal al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014).
- Sastrawaty, Nila. "Hukum Sebagai Integrasi Pertimangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan", *Jurnal al-Daulah*, vol. 1 no. 1 (Desember 2012).
- Sholeh, Akhmad. "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Indonesia", *Jurnal Palastren*, vol. 8 no. 2 (Desember 2015).
- Soleh, Akhmad. *Aksebilas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Tardisi, Didi. "Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat", *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, vol. 2 no. 2 (November 2008).
- Utami dkk , Ezza Oktivia. "Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa", *Jurnal Penelitian & PPM*, vol. 5 no. 1 (April 2018).
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'yah", *Jurnal Al-Daulah*, vol. 4 no. 2 (Desember 2015).
- Wismulyani, Endar. *Transpotasi di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018).

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Akademika*, vol. 19 no. 1 (Januari 2014).



LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Yan Erwin Renpe, S.T. M.Si

Analisis Angkutan Darat



Wawancara Dengan Bapak Edisa Ade Prastyo Kurnadi S.H
Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

ALAUDDIN
MAKASSAR



Wawancara Dengan Ibu Agustina Widyati S.Sos
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan UPT Trans
Mamminasata



Wawancara Dengan Penyandang Disabilitas Tunanetra dan Tunadaksa



Wawancara Dengan Masyarakat dan Penyandang Disabilitas Tunarungu



Wawancara Dengan Masyarakat



Halte bus



Halte Bus



Bus Transmamminasata

Bahan Wawancara

Dinas Perhubungan

1. Nama, Jabatan bapak/ibu ?
2. Sejak kapan bapak/ibu menjadi pegawai atau kepala dinas perhubungan di kota makassar ?
3. Apakah dalam penyediaan pelayanan transportasi publik ada aturan atau SOP tersendiri ?
4. Bagaimana dasar hukum penyediaan fasilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas ?
5. Dalam penyediaan fasilitas transportasi publik, apakah sudah memperhatikan dan melibatkan para penyandang disabilitas ?
6. Kendala apa yang dihadapi dalam membangun fasilitas transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas ?
7. Bagaimana upaya pemerintah atau dinas perhubungan dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas dapat menikmati fasilitas transportasi publik dengan mudah ?

Penyandang Disabilitas

1. Nama/ alamat/ jenis disabilitas/ penyebab disabilitas ?
2. Sejak kapan mulai menggunakan transportasi umum ?
3. Tujuan atau alasan menggunakan transportasi umum ?
4. Apakah pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan selama menggunakan transportasi umum ?
5. Menurut bapak/ibu apakah transportasi umum sudah ramah difabel ?

6. Apakah transportasi umum bagi penyandang disabilitas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip aksesibilitas ? (seperti: kemudahan, keselamatan, kegunaan, kemandirian)
7. Apa harapan bapak/ibu kepada pemerintah terkait dengan penyediaan pelayanan transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas ?

Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai transportasi umum. Apakah ada perubahan sejak pertama diluncurkan hingga saat ini ?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada penumpang penyandang disabilitas ?
3. Seberapa sering bapak menjumpai penyandang disabilitas menggunakan alat transportasi umum ?
4. Apakah ada aturan atau sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Makassar sebagai pengelola transportasi umum terkait bagaimana seharusnya memberikan kepada penyandang disabilitas ?
5. Apakah penyandang disabilitas dibantu pada saat mengakses transportasi umum ?
6. Apakah ada hambatan bagi penyandang disabilitas pada saat mengakses transportasi umum ?
7. Bagaimana harapan bapak terkait transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas ?



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7572/S.01/PTSP/2020
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3175/SH.0.1/PP.00.9/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANJAS APRIZAL**
 Nomor Pokok : 10200116101
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR
 TELAAH PERDA NO. 6 TAHUN 2013 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 20 Oktober 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. Peninggal

SIMAP PTSP 20-10-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- 3175/SH.01/PP.00.9/10/ 2020 Samata Gowa, 19 Oktober 2020
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov.Su Sel
Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang
tersebut dibawah ini :

Nama : Anjas Aprizal
N I M : 10200116101
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Perumahan Graha Asri

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah
satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**"Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota
Makassar Telaah Perda No. 6 Tahun 2013 Perspektif Siyasa Syar'iyah"**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag.
2. Dr. M. Thahir Maloko. M.H.I

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan
dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor **Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan** terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 s/d 19
November 2020.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih

Wassalam

Dekan,



Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
NIP. 19731122 200012 1 002

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
(Sebagai Laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Anjas Aprizal lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 26 April 1998, penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, anak dari Ayahanda Abdul Aziz Jaya dan Ibunda Mardiana, penulis memulai Pendidikan di SD Inpres Antang 1, setelah tamat SD pada tahun 2010, penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 17 Makassar hingga tahun 2013, kemudian pada tahun tersebut penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 10 Makassar hingga tahun 2016, setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) pada tahun 2016, pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasyah Syar'iyah). Selama proses perkuliahan, penulis tidak pernah berkecimpung di dunia organisasi kampus. Kemudian penulis menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul "Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif Siyasyah Syar'iyah." Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR